



**POLA INTERAKSI SOSIAL
KONFLIK MASYARAKAT LOKAL
DENGAN INDUSTRI BESAR**

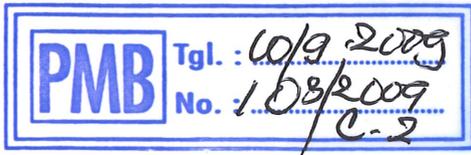
**POLA INTERAKSI SOSIAL
KONFLIK MASYARAKAT LOKAL
DENGAN INDUSTRI BESAR**



Oleh:
Suprihadi
Editor:
Hayaruddin Siagian



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



©2009 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Pola Interaksi Sosial dan Konflik Masyarakat Lokal dengan Industri Besar,
Suprihadi; Editor: Hayaruddin Siagian, Jakarta: LIPI Press, 2009
iii + 82 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-436-5

1. Interaksi Sosial
2. Konflik Industri

303.484

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Sejak reformasi pada tahun 1998 banyak perubahan telah terjadi dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu di era reformasi ini untuk terwujudnya masyarakat Indonesia dengan capaian kualitas hidup yang baik dan harmonis, perlu adanya penumbuhan hubungan sosial yang harmonis untuk mencegah terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Kondisi ini bisa dilihat terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar industri-industri Besar.

Buku ini mencoba mengkaji bagaimana hubungan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar industri besar, yakni hubungan antara masyarakat lokal dengan pihak industri besar serta konflik antara pihak industri besar dengan masyarakat sekitar. Dalam temuan penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa hubungan masyarakat lokal dengan pihak industri kurang harmonis dikarenakan ada tindakan represif dari pihak industri yang menggunakan aparat keamanan untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi antara anggota masyarakat dengan industri. Kondisi ini telah menciptakan polarisasi sosial yang berkepanjangan, terutama timbulnya kelompok-kelompok masyarakat yakni kelompok yang PRO Industri dan kelompok yang KONTRA Industri. Namun demikian masalah-masalah yang muncul telah menimbulkan dampak yang lebih luas, sehingga peran pemerintah baik pusat maupun daerah, peran DPRD turut serta memecahkan masalah-masalahnya agar tidak menjalar sampai terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Buku ini dapat terbit atas kerjasama dengan berbagai pihak serta kerja keras peneliti dan staf administrasi, untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Akhirul kata semoga buku ini bermanfaat,

baik untuk para akademisi maupun praktisi yang terlibat dalam kebijaksanaan pembangunan khususnya pembangunan industri besar yang memperhatikan aspek sosial budaya.

Jakarta, Juni 2009

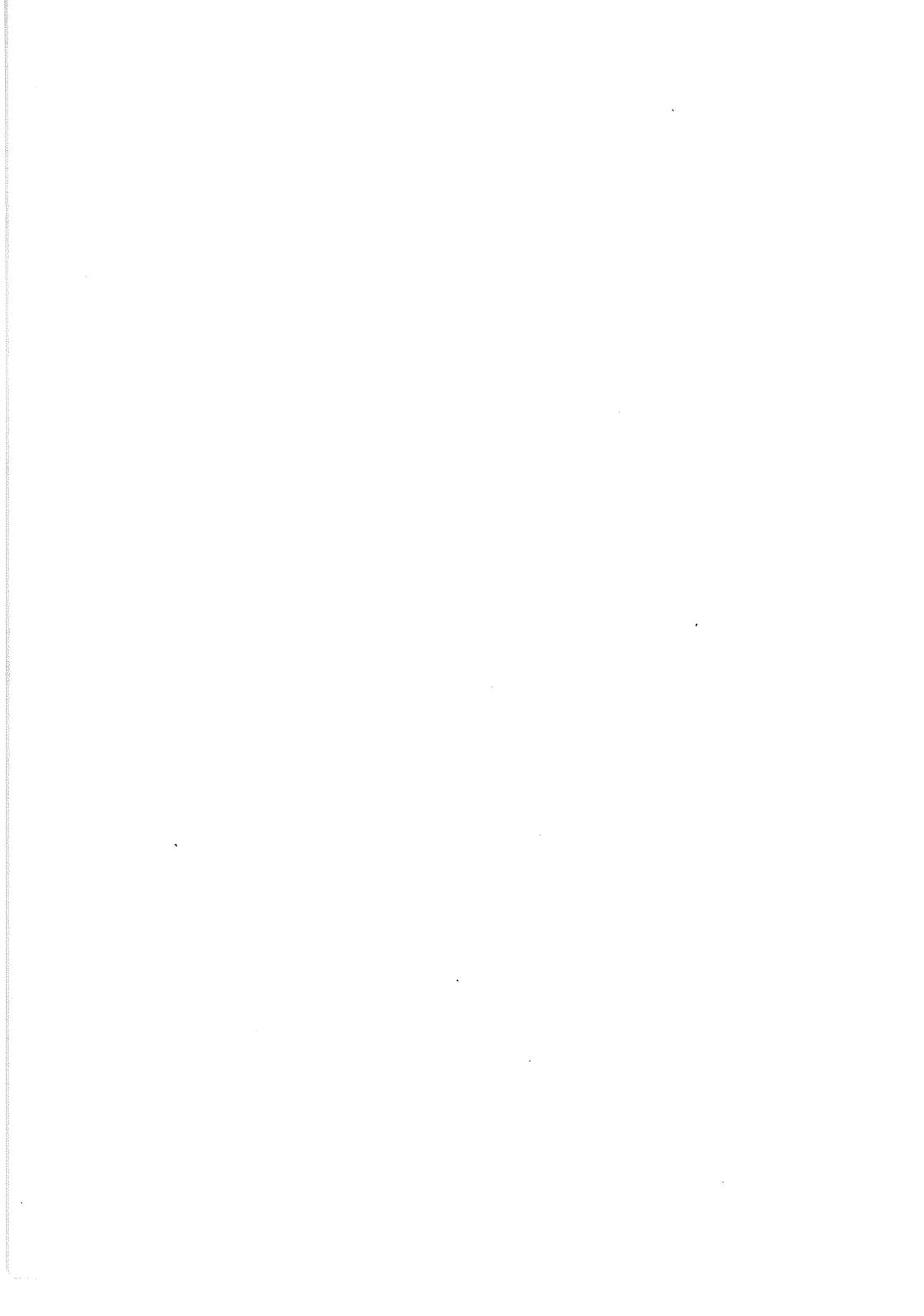
Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan – LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Pemikiran	7
1.5. Metodologi	19
2 PROFIL WILAYAH DAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT SEKITAR INDUSTRI	21
2.1. Kondisi Wilayah.....	21
2.2. Karakteristik Masyarakat Sekitar Industri	25
3 HUBUNGAN SOSIAL DAN KONFLIK MASYARAKAT LOKAL	33
3.1. Hubungan Masyarakat Lokal Dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL).....	34
3.2. Hubungan Pemerintah dengan PT. TPL	40
3.3. Konflik Masyarakat Lokal dengan Pihak Industri	45
3.4. Kasus-kasus Akibat Konflik	59
4 PARADIGMA BARU DAN REOPERASIONAL PT. TPL	69
4.1. Reoperasional PT. TPL dan Hambatannya.....	69
4.2. Paradigma Baru PT. TPL.....	72
5 KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA	81



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan industri dalam pengembangan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional/daerah bukanlah sesuatu yang baru dalam pembangunan ekonomi. Keterkaitan pengembangan ekonomi dengan perindustrian sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti jenis dan skala industri yang ada di daerah. Di samping itu, jaringan industri daerah dengan di daerah tetangganya. Perkembangan ekonomi daerah juga sangat erat dengan posisi dan kekuatan sektor-sektor perekonomian itu sendiri. Sektor perekonomian bisa menjadi motivator ekspor atau sebaliknya motivator import. Kalau sektor tersebut menjadi motivator ekspor, besar kemungkinan posisi perdagangan cenderung surplus, artinya devisa yang masuk lebih besar dari devisa yang keluar.

Surplus yang diperoleh dapat dipakai untuk mengembangkan perekonomian ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau perekonomian daerah sangat tergantung pada import, maka dalam jangka panjang daerah tersebut bisa mengalami defisit terus-menerus karena pendapatan penduduk mengalir keluar dan perekonomian daerah akhirnya akan lumpuh.

Kehadiran industri, terutama industri berskala besar, dapat memajukan perekonomian daerah karena industri seperti itu berfungsi sebagai roda penggerak munculnya industri-industri baru. Perlu ditekankan bahwa industri tersebut harus memiliki *linkage effect* (dampak keterkaitan atau mata rantai dengan industri yang dimunculkannya) yang tinggi. Di samping itu pula untuk dapat menjamin keberlanjutan perkembangan perekonomian, lembaga-lembaga dan penduduk daerah harus berusaha sekuat tenaga menjaga

agar proporsi tabungan yang dimiliki jangan terlalu banyak digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk dari daerah lain. Kalau itu terjadi, tabungan sebagai sumber dana investasi akan terkuras dan hanya memperkuat perekonomian daerah lain, yang selanjutnya secara sosial ekonomi perkembangan daerah akan terhambat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat menengok ke belakang yaitu ketika zaman pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto. Model pembangunan industri di masa Orde Baru merupakan salah satu sumber konflik di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah yang terjadi eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pemerintah pusat. Oleh karena itu, konflik perkebunan, kehutanan dan industri besar lainnya, patut ditangkap sebagai suatu gejala pertarungan antara pemodal besar dengan masyarakat kebanyakan. Masyarakat umum merupakan suatu kelompok yang berbasis ekonomi pertanian dan buruh, dan sebagian sebagai buruh dalam proses industrialisasi perkebunan, hutan dan industri-industri di sektor lainnya. Indikasi ini semakin menguatkan asumsi bahwa industri besar telah membawa dampak sosial baru, entah itu proses marginalisasi, peminggiran secara perlahan-lahan, eksploitasi sumber-sumber produksi, maupun bentuk-bentuk penindasan social-politik dan budaya lainnya.

Selain itu, Orde Baru juga sering dianggap telah mewariskan dua sumber konflik besar di Indonesia yang bersumber dari persoalan tanah dan sumber daya alam. Diperkirakan konflik jenis ini kurang lebih terdapat 20.000 kasus dan skalanya sangat besar. Konflik ini dipicu oleh ketidakadilan akses dan kontrol atas tanah dan kekayaan alam yang dikelola oleh Negara, ketidakadilan akses untuk pemanfaatan tanah dan sumber daya alam serta akibat eksploitasi¹. Dalam konteks itu, pada mulanya peran negara dalam berbagai sektor begitu kuat, tetapi perubahan yang cepat akibat reformasi telah membalikkan kondisi tersebut, dimana aktor-aktor negara – pada

¹ Lihat Nurhasim (2002) dalam Konflik dan Dinamika Politik lokal: Kelas Pemodal – Negara versus Masyarakat, P2P-LIPI, hal. 11-12.

mulanya melemah, dan rakyat mulai menguat. Tak heran mulai terjadi berbagai luapan emosional atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi di tingkat lokal.

Isu-isu yang berkembangpun mengalami berbagai perubahan, berbagai persoalan yang di masa Orde Baru tidak dipersoalkan, justru kemudian menjadi persoalan baru, seperti masalah eksploitasi pusat atas daerah, masalah eksplorasi kekayaan alam (sumber daya alam) oleh negara dan pemodal di tingkat lokal. Masalah tersebut mencuat di masa reformasi sehubungan dengan tuntutan masyarakat lokal atas kehadiran industri di berbagai wilayah. Dalam konteks itu ada semacam kecenderungan konflik di tingkat lokal, dimana pemerintah bersama-sama dengan masyarakat lokal terlibat dalam konflik dengan pemerintah pusat, di sisi lain ada kecenderungan konflik terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha. Gejala seperti ini terlihat dari konflik yang terjadi di Riau, Kalimantan Timur, Aceh, Papua, Lampung, tetapi di sisi lain pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat sekaligus terlibat konflik pula dengan pemerintah pusat²

Berbagai bentuk dan model konflik dengan berbagai pilihan-pilihan tema di atas, menarik dan penting untuk dikaji. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan ini hendak melihat dinamika masyarakat lokal hubungannya dengan kehadiran industri besar dan konflik-konflik yang terjadi khususnya yang bersumber dari persoalan kebijakan capital di masa lalu yang menyebabkan konflik di tingkat lokal pada masa reformasi, terutama di Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara dengan kasus kehadiran PT. Inti Indorayon yang sekarang diganti nama PT. TPL (Toba Pulp Lestari) yang mengalami Pro dan kontra dengan masyarakat lokal.

² Kasus-kasus ini terjadi setelah terjadi perubahan dari masa Orde Baru ke era reformasi. Umumnya warga masyarakat di seluruh wilayah di era reformasi, sangat berani mengeluarkan pendapat dan bebas berbicara tanpa mengenal takut terhadap para penguasa baik di daerah maupun pusat.

Sehubungan itu, kehadiran PT. Inti Indorayon Utama di daerah Porsea pada awalnya disambut baik oleh Pemerintah daerah dan masyarakat luas, karena semakin dirasakan perlunya kehadiran suatu industri berskala besar di daerah tersebut. Namun sebagaimana diketahui, yang terjadi lama-kelamaan industri tersebut mendapat reaksi masyarakat lokal. Masyarakat menganggap bahwa keberadaan PT. IIU ternyata tidak membawa peningkatan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat sekitar. Namun sebaliknya telah menimbulkan pencemaran lingkungan. PT. IIU dianggap telah menimbulkan pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, bahkan dianggap bertanggung jawab terhadap penurunan permukaan air danau Toba.

Untuk mendukung tuntutan tersebut, masyarakat beberapa kali mengadakan unjuk rasa, bahkan terjadi kerusakan yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda masyarakat. Unjuk rasa itu mulai digerakkan di Medan, yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari lingkungan hidup sedunia tanggal 8 dan 10 juni 1998, dipelopori oleh LSM, dengan memanfaatkan era Reformasi dan massa mahasiswa yang menuntut reformasi di segala bidang. Kemudian gerakan massa untuk menutup PT. IIU yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 1998 berakhir dengan jatuhnya korban, baik dari tokoh masyarakat, mahasiswa dan aparat, di samping terjadi pengrusakan sejumlah rumah di sekitar Porsea.

Berbagai alasan yang dengan cepat telah disebarluaskan dan menjadi opini masyarakat sekitar Porsea, adalah bahwa kehadiran PT. IIU di Porsea telah menciptakan kerusakan lingkungan, mempercepat penggundulan hutan, menurunkan permukaan air danau Toba, kegagalan panen padi dan sayuran, kematian hewan peliharaan, kerusakan rumah penduduk, menimbulkan bau busuk dan kekhawatiran bahwa dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker, paru-paru, gatal-gatal dan mengerdilkan manusia. Berbagai perilaku PT. IIU di masa Orde Baru yang lalu, yang bersikap arogan, selalu berorientasi kepada penguasa dalam menyelesaikan setiap perselisihan dengan masyarakat.

Perselisihan yang dengan sendirinya berakhir dengan kemenangan pihak perusahaan, telah mempercepat berkembangnya isu negatif tersebut di atas.

Kehidupan masyarakat sekitar sangat dipengaruhi oleh keberadaan industri tersebut yang beroperasi sejak tahun 1988-an. Dengan pergantian nama dari PT. IIU menjadi PT. TPL pada tahun 2002 ini juga salah satu tuntutan masyarakat sekitar, mayoritas penduduk menginginkan PT. Indorayon ditutup, dan namun ada pula sebagian masyarakat yang menginginkan agar PT. Indorayon tetap beroperasi. Boleh dikatakan terdapat kelompok masyarakat yang Pro dan kontra terhadap PT. TPL. Namun demikian, dengan diganti nama menjadi PT. TPL, sikap masyarakat sekitar tidak pernah percaya dengan pelaksanaan industri TPL meskipun menggunakan paradigma baru.

Sekarang pemerintah mengizinkan perusahaan itu, yang kemudian berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari, untuk beroperasi kembali. Namun hal itu kembali mengundang kontroversi dan aksi-aksi dari sebagian masyarakat setempat, yang kemudian melancarkan aksi-aksi protes menentang operasional kembali pabrik tersebut. Puncaknya adalah perusakan kantor kecamatan Porsea oleh sekelompok massa, disusul dengan penangkapan sejumlah orang yang diduga menjadi dalang aksi itu. Salah satu alasan kelompok penentang pengoperasian kembali pabrik pulp itu adalah, mereka mulai merasakan hidup normal sejak penghentian operasional pabrik. Mereka mengaku kehidupan sangat terusik sejak perusahaan beroperasi pada tahun 1989, terutama kemerosotan penghasilan dari sektor pertanian.

Kasus PT. TPL di Sumatera Utara itu merupakan salah satu contoh yang mengilustrasikan bahwa industri pada akhirnya menjadi sumber konflik di daerah tersebut. Konflik dipicu oleh masalah kristalisasi dan kekecewaan rakyat yang sudah “diambang batas”, akibat pencemaran lingkungan yang mereka alami sebagai dampak dari beroperasinya pabrik kertas di Porsea, kabupaten Toba Samosir.

Kehadiran pabrik pulp ini dari awal telah ditentang oleh masyarakat lokal, karena kehadirannya dipaksakan oleh pemerintah pusat. Masyarakat menolak kehadiran pabrik itu karena masyarakat diperlakukan tidak adil dalam masalah penggusuran tanah, serta ketakutan masyarakat akan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya³. Pada masa reformasi, pertentangan tersebut semakin sering terjadi, bahkan menyebabkan maraknya aksi kekerasan, baik yang dilakukan oleh masyarakat yang menolak (kontra), maupun pihak industri TPL dan beberapa centeng sewaan, serta aparat keamanan. Aksi-aksi tersebut juga diwarnai oleh perusakan rumah, pembakaran dan beberapa kasus penembakan atau pemukulan oleh aparat keamanan⁴

Berbagai peristiwa-peristiwa tersebut, yang dapat dijadikan sebagai fokus kajian yaitu hubungan sosial, konflik antara masyarakat lokal dengan pihak industri TPL. Rentang hubungan sosial dan konflik yang hendak dikaji adalah yang muncul pasca Orde Baru (era reformasi), karena pada masa itu intensitas hubungan sosial dan konflik sangat besar dan sering terjadi.

1.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang timbul adalah bagaimana hubungan sosial yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pihak industri besar, dan bagaimana pola hubungan sosial yang berlangsung. Akibat hubungan sosial yang kurang harmonis, juga akan mengarah pada konflik. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya konflik di lokasi penelitian, bagaimana konflik yang terjadi ? Dan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, serta bagaimana pemahaman

³ Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat lokal, yang tinggal di sekitar industri TPL.

⁴ Ibid

mereka tentang konflik dan apa saja tindakan mereka dalam konflik yang terjadi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

- (1) Menggambarkan pola hubungan sosial yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pihak industri besar. Demikian pula juga ingin mengetahui sampai sejauh mana hubungan sosial antara pihak industri besar dengan pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Menggambarkan sumber-sumber, faktor-faktor penyebab, pola dan para aktor yang terlibat dalam konflik.
- (3) Memberikan alternatif solusi dalam rangka penanganan konflik yang terjadi di lokasi penelitian dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait.

1.4. Kerangka Pemikiran

Kehadiran industri besar di suatu daerah, tentu akan menimbulkan tanggapan masyarakat, yaitu ada yang pro dan ada yang kontra terhadapnya. Bagi yang pro, tentu saja karena mereka merasa diuntungkan karena keberadaannya, demikian pula yang kontra karena merasa dirugikan. Namun demikian keberadaan industri itu pasti akan menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat lokal, baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi maupun politik.

Pada sisi lain, pada era reformasi yang identik dengan era demokratisasi, telah mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk tampil beda dibanding ketika masa pemerintahan Orde Baru. Di era reformasi, masyarakat telah mulai berani mengeluarkan pendapat atau kritik terhadap pembangunan, apabila mereka diperlakukan tidak adil. Kondisi yang demikian akan tumbuh pula dinamika politik lokal bagi kehidupan masyarakat setiap menghadapi pembangunan yang

dianggap merugikan ataupun sebaliknya. Seperti misalnya, dengan adanya pembangunan industri besar, kalau di zaman Orde Baru, meskipun masyarakat dirugikan mereka hanya akan diam atau pasrah menerimanya karena sudah merupakan kebijakan dari Negara. Kondisi sekarang lain, karena di era reformasi ini, masyarakat akan lebih berani memberikan kritik apabila diperlakukan tidak adil atau bahkan tidak dihargai hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat.

Dinamika politik lokal adalah salah satu dampak pembangunan di era reformasi ini. Karena dinamika politik lokal adalah suatu proses interaksi antar berbagai aktor di level state dan masyarakat di daerah. Interaksi tersebut menunjukkan gejala peningkatan yang luar biasa di masa transisi demokrasi. Peningkatan interaksi itu kerap kali cenderung ke arah antagonisme. Perubahan politik dan sosial ini, diakui telah membawa dampak baru dalam interaksi antar berbagai aktor di tingkat lokal dalam konflik. Aktor merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik seperti aktivis mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, pemuda, petani, dan berbagai kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda-beda.

Sedangkan kelas, Karl Marx memandang bahwa setiap masyarakat terdiri dari dua kelas yang saling berbenturan yaitu masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Tipologi Marx ini, dikritik oleh Ralf Dahrendorf, karena diantara kedua kelas itu ada kelas yang disebut sebagai kelas perantara atau kelas menengah⁵. Kelas lapisan atas merujuk pada kelas yang memiliki aset produksi. Para pemodal bisa disebutkan seperti itu, meskipun agak mengandung resiko, karena bila mengikuti kategori yang rigid dari Marx, maka kelas di Indonesia tidak memiliki ciri-ciri kelas sebagaimana dalam pengertian Marx. Namun demikian, konsep Marx dikritik oleh Ralf Dahrendorf yang kemudian memodifikasi kelas sebagai

⁵ Selanjutnya dalam penjelasan David Lee dan Howard Newby, *The Problem Of Sociology*, (New York: Routledge,1983) hal.31-32 menyebutkan bahwa kelas atas

“Occupational classes are essentially power classes within the realm of work.” Dalam pengertian umum mengenai “kelas”, bila hal ini digunakan untuk melihat kasus konflik antara pemodal dan masyarakat di atas, maka pengertian kelas lebih merujuk pada pengertian kelas sosiologis, bukan pengertian kelasnya Marx. Karena itu, kelas disini lebih dipahami sebagai kelas yang lebih mirip diartikan oleh Mac Iver sebagai kelompok-kelompok sosial yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu;

- (1) kesamaan kondisi sosial;
- (2) kesamaan status sosial; dan
- (3) kesamaan nilai-nilai sosial.

Berdasar atas kategori ini, maka kelas bisa diartikan atas tiga kategori yang dibuat oleh Mac Iver di atas. Kelas pemodal jelas memiliki kesamaan kondisi yaitu menghendaki adanya keuntungan, status sosialnya secara ekonomi adalah pihak yang menguasai aset produksi atau sumber daya alam dan nilai sosialnya jelas yaitu mengubah sumber daya alam menjadi keuntungan. Mereka mempunyai alat produksi, modal, jaringan pemasaran, dan lain sebagainya. Sebaliknya, lawan dari kelas pemodal adalah kelas yang tidak memiliki modal, atau sering disebut sebagai kelas bawah dalam pengertian status sosial. Kondisi umum yang mereka alami biasanya memiliki ciri-ciri tertentu seperti keadaan sosial atas aset terhadap sumber-sumber produksi yang lemah, sebagian sebagai kelompok yang berstatus sosial menengah ke bawah, dan memiliki nilai-nilai sosial tertentu sebagai suatu masyarakat.

Karena itu, masyarakat di daerah konflik di sekitar industri PT. TPL, secara umum dianggap sebagai kelas yang tidak memiliki akses dalam sumber-sumber capital dalam proses industrialisasi yang dikembangkan oleh Negara. Sementara kelas menengah sebagaimana kategori Dahrendorf merupakan kelas sosial yang relatif independen seperti mahasiswa, LSM, dan lain sebagainya, yang kerap kali

merupakan kelas yang memiliki skill tertentu dan kemampuan tertentu.

Kelompok-kelompok ini sering bisa disebut sebagai kelas perantara antara kelas atas dan kelas bawah. Dengan demikian, seperti yang dijelaskan oleh Ralf Dahrendrof bahwa basis pembentukan kelas adalah hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Di sini kepentingan atau interest merupakan salah satu kunci dari basis pembentukan kelas tersebut. Oleh karena itu, Dahrendrof bahkan agak begitu longgar mengartikan kelas dengan uraiannya seperti ini “Sejumlah individu merupakan suatu kelas, sejauh mereka dilibatkan dalam suatu perjuangan kelas bersama melawan kelas lain”. Karena itu kekuatan yang mempengaruhi pembentukan kelas adalah kepentingan kelas.

Dalam kasus yang dijadikan foKus kajian, tampaknya ada gejala-gejala seperti yang dikemukakan oleh Dahrendrof. Bahwa sebagian besar individu-individu di sekitar lokasi industri pada tahun 1998 terlibat secara intens dalam perjuangan akan hak-hak mereka melawan kelompok pengusaha. Di Batam bahkan ada kecenderungan sebagai primordialisasi dengan menyebut diri mereka sebagai etnik asli dalam melawan implikasi industri dan kehadiran kelompok pemodal di luar mereka. Sebagian besar individu-individu di sekitar PT. TPL terlibat secara intens dalam perjuangan akan hak-hak kepemilikan mereka yang dikuasai oleh para pemodal di masa Orde Baru. Karena itu, di antara mereka memiliki suatu kepentingan yang berbeda dalam hubungan ekonomi, sosial, maupun politik. Karena itu bagaimanapun dalam pemahaman yang agak longgar kelas diartikan demikian. Pertentangan kelompok buruh dan industri di Batam sekilas juga mengilustrasikan perbedaan kepentingan seperti itu.

Dalam konteks hubungan antara masyarakat dan pemodal di atas, baik dalam suasana konflik maupun dalam suasana damai, peran negara (*state*) tetap tidak mungkin dihindarkan. Negara dapat dirumuskan dalam dua perangkat analisis yaitu Individu-individu dan lembaga. Nordlinger melihat negara secara subyektif atau dalam

peringkat analisis individual yaitu para individu yang menduduki posisi yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat semua pihak yang ada di dalam wilayah tertentu, termasuk dalam kategori ini adalah Presiden, para menteri, dan para kepala daerah. Para pejabat ini mungkin merumuskan preferensinya dari berbagai sumber, karena itu Nodlinger mengatakan bahwa para pejabat pemerintah itulah yang memiliki preferensi kebijakan sendiri.

Sementara Kresner dan Skocpol melihat negara dalam arti lembaga atau jabatan (peringkat analisis lembaga). Karena itu menurutnya negara dirumuskan secara sempit yaitu seperangkat organisasi administratif, kepolisian dan militer yang dipimpin dan dikoordinasi oleh kewenangan eksekutif. Dalam konteks di negara dunia ketiga Migdal memperkenalkan istilah negara kuat (*strong state*) dan negara lemah (*weak state*). Negara kuat dicoraki karena mempunyai kemampuan membuat dan menegakkan hukum dan peraturan lainnya terhadap anggota masyarakat secara konsisten. Sedangkan negara lemah ditandai oleh penerapan politik "asal dapat bertahan" (*survival*) dan politik akomodasi terhadap beberapa organisasi sosial yang kuat dalam masyarakat. Negara menurut Karen Barkey diartikan sebagai aparatur pemerintah dimana administrasi berarti ekstraksi sumber-sumber kontrol, paksaan, dan pemeliharaan tertib politik, hokum dan norma-norma di masyarakat.

Dalam konteks itu, maka negara yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kedua-duanya bisa pada individu maupun lembaga. Negara adalah aktor dengan kepentingan mereka sendiri yang tidak selalu mencerminkan kepentingan masyarakat. Artinya, negara bersifat otonom dari masyarakat. Negara juga merupakan instrumen (alat) dari kepentingan keamanan dari kelas-kelas dominan. Oleh karena itu dalam situasi konflik yang disebut negara adalah individu yang mempunyai posisi untuk membuat dan melaksanakan kebijakan. Selain itu seperangkat organisasi administratif termasuk birokrasi, militer dan kepolisian bisa merupakan bagian dari negara karena sesungguhnya ia merupakan alat dari negara itu sendiri.

Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa individu-individu yang mempunyai posisi tersebut memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda-beda karena memang ia memiliki preferensi kebijakan sendiri.

Karena itu, di era Otonomi Daerah dan transisi demokrasi Indonesia, kecenderungan negara yang tepat adalah negara versi kedua dari konsep Migdal yaitu negara lemah. Tidak adanya konsistensi hukum dalam upaya untuk memberikan pedomanan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan mereka. Kecenderungan demikian terjadi di tingkat lokal maupun pusat, bahkan dalam situasi konflik seringkali mereka saling melempar tanggungjawab, apakah konflik yang terjadi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah ataukah merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat.

Sementara itu, konflik dalam pengertian yang longgar diartikan mulai dari pertentangan pendapat, teror, amok massa/kerusakan sosial, pembunuhan massal (*genocide*) hingga perang. Ditilik dari sumber konfliknya bisa disebabkan oleh banyak faktor. Dalam pandangan kaum Marxian, konflik dipandang sebagai gejala sosial yang selalu hadir dalam masyarakat. Mengenai konflik dan dinamika politik dapat dijelaskan bukan dari sumber konfliknya semata, tetapi dari dimensi faktornya. Perubahan sosial-politik patut dipandang sebagai suatu faktor utama yang menjadi faktor pendukung terjadinya konflik di tingkat lokal.

Perubahan dari rezim otoriter ke ruang demokrasi dapat menyebabkan berbagai sendi kehidupan yang pada mulanya mapan, mulai dikoreksi kembali. Berbagai tatanan lama dipersoalkan, dan pengoreksian di sana-sini terjadi. Termasuk dalam katagori yang terkoreksi adalah masalah pembangunan di daerah yang dianggap terlalu bersifat eksploitatif. Pembangunan yang awalnya diharapkan dapat menumbuhkan sektor-sektor ekonomi menengah dan bawah, ternyata justru terjadi yang sebaliknya.

Selain itu, pemusatan ekonomi pada kelas-kelas tertentu yang disebut sebagai kelas pemodal di Indonesia, menyebabkan adanya

gejala alienasi interaksi sosial. Sekat-sekat interaksi sosial yang cenderung eksploitatif, dengan ciri stabilitas semunya, akhirnya berubah ketika terjadi ledakan perubahan sosial dan politik yang demikian dahsyat. Reformasi yang dimulai dari gerakan mahasiswa bagaimanapun merupakan factor pendobrak terjadinya percepatan perubahan tersebut. Dalam setiap perubahan sosial yang terlalu cepat akan menimbulkan berbagai dampak, salah satunya adalah munculnya konflik dengan berbagai dimensinya.

Kegagalan pembangunan di Indonesia yang ditandai oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, bagaimanapun telah menyebabkan runtuhnya mitos kelas-kelas elite yang telah dibangun oleh Orde Baru. Sejak Pemilu tahun 1999 dilakukan, transisi politik menyebabkan adanya kecenderungan kelas-kelas sosial baru baik dalam status politik maupun sosial. Elite lokal dan para pemodal sebagai anak Orde Baru, yang begitu kuat berkuasa dan dominan karena ditopang oleh kekuasaan dan militer, mengalami delegitimasi dan digantikan oleh para aktor-aktor baru yang menempati kelas elite seperti mereka yang duduk di parlemen, eksekutif, maupun kelompok-kelompok kepentingan strategis. Dalam konteks perubahan demikian, rakyat menjadi suatu kata kunci politik yang dominan, karena mereka memiliki kekuatan pendobrak sebagai salah satu dinamisator politik di tingkat lokal.

Kemunculan aktor-aktor baru ini bagaimanapun merupakan faktor yang patut dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika politik lokal. Mereka ini memiliki kekuatan tertentu untuk mendorong suatu gerakan politik yang memiliki kekuatan penekan yang cukup besar. Para aktor-aktor baru inilah yang dapat dikatakan mempelopori terjadi perubahan sosial di tingkat lokal. Termasuk dalam kerangka perubahan yang terjadi tersebut adalah bagian dari terjadinya konflik antara pemilik modal dengan masyarakat dan dalam hal ini negara.

Konflik diantara kelompok-kelompok ini dapat dilihat pula dari bangunan nilai dan penggunaan simbol-simbol di antara mereka

yang tentu akan menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam pandangan kritik disebutkan bahwa terjadinya konflik di dalam suatu komunitas disebabkan pula oleh dampak dari struktur sosial yang tidak seimbang di mana kelompok pemilik modal melakukan eksploitasi terhadap kelompok sosial di bawahnya. Kondisi yang tidak seimbang ini terus bertahan dan ditopang pula oleh kebijakan negara yang telah dikuasainya. Ketika terjadi suatu perubahan politik kondisi semua itu mengalami perubahan.

Dukungan negara yang melemah ke pemilik modal, dan kekuasaan berada di tangan rakyat, menyebabkan adanya dominasi yang berbalik, dan mulailah terjadi pertentangan antara masyarakat kebanyakan dengan para pemilik modal. Konflik ini sesungguhnya dipicu oleh suatu rekonstruksi struktural yang cenderung serampangan. Mayoritas diam yang identik dengan masyarakat umum di masa Orde Baru – ketika terjadi perubahan politik, mereka berubah bukan lagi sebagai mayoritas diam, tetapi mayoritas yang mulai dengan bergerak, sehingga berbagai perlawanan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang menyebabkan krisis ekonomi politik maupun kerugian sosial bagi kelompok ini, terus memicu konflik yang berdimensi luas. Isu yang sering paling diusung adalah isu lingkungan, meskipun tidak menutup kemungkinan ada isu-isu lain, seperti dampak dan penderitaan yang dilalui, serta persoalan-persoalan manfaat dan kerugian. Konflik akhirnya bisa saja mengacu kepada klaim yang tumpang tindih terhadap: hak, pengawasan, penggunaan terhadap sumber daya alam, atau berkaitan dengan kosekuensi-konsekuensi pemanfaatan lingkungan, termasuk pemakaian air, tanah, dan sumber daya alam lainnya serta ketimpangan kebijakan ekonomi yang dianggap tidak ada keadilan.

Berkaitan hal tersebut, bahwa masuknya industri ke suatu daerah pasti akan ditanggapi secara berbeda oleh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat lokal. Industri sebagai pembawa perubahan tidak hanya berdimensi pengembangan atau kemajuan, tetapi juga berdimensi sebagai penyebab ketidakseimbangan, perbedaan sosial budaya, pergeseran nilai-nilai, perbenturan

kepentingan, konflik dan juga kesenjangan sosial budaya. Kesenjangan dan industrialisasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Runciman (1969: 45) yang mengutip Marx, menyatakan bahwa kesenjangan (*inequality*) merupakan “*the consequences of industrialization*”. Konsepsi yang sama juga dikemukakan oleh David E. After (1965: 72), dengan menyatakan bahwa pembangunan (termasuk industrialisasi) menciptakan kesenjangan, sedangkan modernisasi menonjolkan perubahan. Berarti, pembangunan dan kesenjangan berjalan seiring.

Terciptanya kondisi ketidakseimbangan karena industri itu tidak pernah memuaskan semua pihak yang berada di daerah sekitar industri. Pihak yang merasa diuntungkan oleh hadirnya industri besar akan menanggapi secara positif atau akan menerima kehadirannya. Kemudian kelompok ini akan mengaku bahwa kehadiran industri itu membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Sebaliknya mereka yang merasa dirugikan akan menyatakan bahwa industri besar itu tidak bermanfaat dan cenderung mengeksploitasi masyarakat sekitar. Oleh karena itu mereka akan menolaknya. Jika demikian halnya, penolakan itu akan menjadi sumber perlawanan atau tidak adanya semangat terhadap pembangunan (Soedjatmoko, 1995:10).

Suparlan mengemukakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sebuah perubahan adalah karena:

- (1) Masyarakat sudah terbiasa berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda.
- (2) Unsur kebudayaan baru itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dominant yang didukung oleh masyarakat.
- (3) Unsur-unsur kebudayaan baru itu telah mempunyai landasan di dalam suatu masyarakat; dan
- (4) Kegunaan unsur kebudayaan baru itu dapat dibuktikan dengan mudah (Suparlan, 1986:110-111).

Tentang sikap penolakan terhadap sebuah perubahan berhubungan dengan adanya:

- (1) Sistem stratifikasi sosial yang kaku, ketimpangan social yang mencolok, fragmentasi komunitas, kepentingan terselubung dan bahkan pola kebudayaan mesin yang terdapat dalam masyarakat.
- (2) Faktor sosial psikologis, misalnya terdapatnya trauma-trauma yang melekat dalam perubahan itu akibat peristiwa masa lalu ataupun peristiwa yang pernah dialami oleh masyarakat lain, karena perubahan itu membawa kesengsaraan bagi masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Perubahan itu dinilai akan mengganggu perubahan lain yang lebih tinggi nilainya.
- (4) Adanya pertimbangan rasional mengenai resiko yang ditimbulkannya yang menyebabkan arah baru itu terlihat sangat bodoh; dan
- (5) Perubahan itu berlawanan dengan nilai-nilai fundamental rakyat tertentu (Laurel, 2001: 11-17). Misalnya, kehadiran Proyek Pencairan Gas Alam di Lhok Seumawe tahun 1975 telah mengakibatkan meningkatnya kebiasaan remaja di sana mengunjungi restoran remang-remang sambil menikmati minuman keras, menonton bioskop, main cewek dan berbagai gejala yang menyimpang dari kelaziman yang didukung bersama (Tangdilingtin, 1976:58).

Dengan demikian, kehadiran industri besar ke suatu daerah dapat pula menimbulkan perubahan sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam kaitan ini, potensi masyarakat lokal dapat mempengaruhi kelangsungan keberadaan industri besar itu sendiri. Bagi masyarakat, potensi itu adalah sumber daya, wadah kekuatan atau tenaga baik lahir maupun batin, berkaitan materi maupun non materi. Dalam masyarakat komunal, potensi itu diperkuat oleh adanya faham komunalisme yang menjunjung tinggi keutuhan dan supermasi kolektif (agama atau suku bangsa) dengan

ciri-ciri keterikatan warganya yang sangat erat dengan berbagai bidang kehidupan serta kelompoknya. Kehidupan mereka disusupi oleh kekuatan supernatural; kehidupan mereka sangat tegas dan sekaligus pula dengan batas-batas teritorial (Tamagola, 2001).

Dalam kehidupan masyarakat sekitar industri besar yang terdiri dari berbagai etnis terutama etnis lokal dan pendatang, potensi itu adalah inheren karena secara sosial setiap kelompok etnis yang ada dilahirkan berbeda menurut bermacam-macam unsurnya (fisik, budaya, agama, daerah, warisan budaya). Perbedaan-perbedaan itu dapat menciptakan integrasi sosial ketika di kalangan komunitas yang ada dibangun interaksi dialogis yang intensif. Tujuan interaksi itu ialah untuk menularkan saling pengertian, pemahaman dan sesuatu yang sangat penting adalah meningkatkannya dalam bentuk kerjasama. Pada ruang yang lebih luas, interaksi yang intensif dapat dijadikan sebagai suatu peluang bersama atau "*Common Platform*" yang dapat menstransformasikan kepentingan kelompok (social, etnis) ke dalam kepentingan yang lebih luas, misalnya bangsa dan negara.

Sehubungan dengan menciptakan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat sekitar industri besar, menurut Usman Pelly (1994) diperlukan beberapa strategi dan mekanisme adaptasi diantara kelompok-kelompok masyarakat. Strategi adaptasi menyangkut upaya menyeimbangkan antara misi dan latar belakang kehidupan kelompok masyarakat, mengatasi rintangan-rintangan yang dihadapi, termasuk di dalamnya perubahan yang setiap waktu bisa terjadi dan penetapan pilihan pada pekerjaan dan pemukiman.

Sementara itu, mekanisme adaptasi bisa diciptakan melalui asosiasi-asosiasi (lembaga-lembaga) sosial terutama yang berinteraksi keluar, sehingga mereduksi sekat-sekat (bisa dalam bentuk primordialisme, perbedaan agama, klas atau pelapisan sosial, dan lain-lain) yang bisa menghambat terbentuknya saling pengertian. Mekanisme ini pada satu sisi menjaga identitas khusus, yang diterima sebagai warisan cultural (*ascribed identity*) kelompok-kelompok

sosial yang berbeda. Pada sisi lainnya, mekanisme itu berperan untuk memfasilitasi terwujudnya identitas kebersamaan yang diakibatkan oleh adanya kepentingan bersama (*achived identity*) sebagai suatu tuntutan dari situasi kemajemukan yang sedang berkembang.

Di daerah sekitar industri besar, potensi masyarakat lokal untuk menuju integrasi sosial juga sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan manajemen industri besar itu sendiri. Kebijaksanaan itu antara lain bagaimana membina hubungan dengan kehidupan masyarakat sekitar baik di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Sebab kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diimplementasikan akan mendapat tanggapan berbeda oleh masyarakat lokal, dan kadangkala juga akan menimbulkan kesenjangan sosial.

Secara umum dapat diidentifikasi sumber-sumber kesenjangan sosial adalah sebagai berikut:

- (1) Meskipun misi awalnya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, namun ternyata pihak industri besar kemudian menjadi faktor yang menentukan, menguasai dan bahkan mendiktekan kemauannya terhadap masyarakat lokal.
- (2) Menghadapi keadaan demikian itu, sebagai warga masyarakat lokal mengalami kegoncangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam ketidakberdayaan menghadapi pengaruh industrialisasi, mereka akhirnya menganggap bahwa program industrialisasi hanyalah merupakan intervensi yang merusak harmoni sistem sosial budaya mereka dan bukan cara bagi pengembangan kehidupan yang lebih baik.
- (3) Masuknya para pendatang yang mengikuti kehadiran industri besar ternyata memiliki kemampuan ganda. Pada satu sisi, secara relatif mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat industri, pada sisi lainnya mereka mampu pula mengambil alih posisi sebagai produsen hasil-hasil bumi yang disukai masyarakat industri yang sebelumnya merupakan dominasi masyarakat lokal. Keadaan ini semua akan mempengaruhi potensi masyarakat lokal,

sebab selain berusaha bertahan terhadap pengaruh industrialisasi, juga harus bersaing dengan para pendatang di dalam merebut peluang-peluang usaha yang muncul karena keberadaan perusahaan industri besar. Oleh karena itu dalam pengembangan industri besar, kalau ingin eksis secara kontinyu, maka perlu diciptakan keharmonisan menyesuaikan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat lokal.

1.5. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data lapangan yakni dengan melakukan wawancara mendalam, berdasarkan daftar pertanyaan mendalam (*depth interview guide*) dengan mempertimbangkan proporsionalitas agama, status penduduk asli dan pendatang, suku, dan antar golongan masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian. Beberapa kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai informan yaitu: Masyarakat lokal, tokoh adat, tokoh agama, Pemuka suku, Pimpinan Formal seperti Camat, Kepala Desa, pejabat pemerintah daerah, Kalngan intelektual/kampus, kalangan LSM, Polisi/TNI, Anggota DPRD Tk. I dan II dan tokoh partai politik.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu masyarakat sekitar industri besar dan tokoh-tokoh masyarakat serta nara sumber lainnya yang berkompeten. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, data-data statistik dari instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, kantor Statistik, kantor industri besar, dan lainnya.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan diantaranya melalui Observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian. Di samping itu, teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam yang pedoman wawancaranya telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam wawancara mendalam ini dikembangkan pertanyaan-pertanyaan yang dialogis, dengan berdasar

pada pokok-pokok pertanyaan tadi, sehingga kedalaman informasi yang dibutuhkan bisa tergali.

Kemudian tentang lokasi penelitian, bahwa penelitian ini dilakukan di daerah sekitar PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yaitu tepatnya di wilayah kecamatan Porsea, Kabupaten Balige, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan banyaknya kasus atau permasalahan yang muncul dan dialami oleh masyarakat sekitar Industri Besar tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa sejak berdirinya industri tersebut di daerah ini telah terjadi ketegangan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat sekitarnya.

PROFIL WILAYAH DAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT SEKITAR INDUSTRI

2.1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Porsea yang merupakan lokasi industri PT. TPL, adalah terletak pada cekungan pegunungan Bukit Barisan, dengan tinggi pegunungan sekitar 1400-2300 dari permukaan laut (dpl), dan dasar cekungan panjangnya 87 km dan lebar 27 km. Di kecamatan inilah dibangun pabrik bernama industri TPL yang dahulunya bernama pabrik Inti Indorayon Utama, tepatnya di desa Sosorladang, kecamatan Porsea (letaknya di posisi 930 dpl). Demikian pula letaknya di tepi sungai Asahan, yang airnya mengalir dari Danau Toba hingga ke laut lepas di wilayah Tanjung Balai. Jumlah Penduduk kecamatan Porsea sekitar 36.827 jiwa, dan sebagian besar bermatapencarian di bidang agraris, yaitu sebesar 60% bertani, dan sebagian penduduk mencari ikan di sungai-sungai. Kehidupan sehari-hari, mereka tergantung pada air dan hutan.

Lokasi pabrik PT. TPL terletak di kawasan hulu sungai, kurang lebih sejauh 7 km dari kota kecamatan Porsea, dan 4 km dari bendungan Siruar Regulasi danau untuk PLTA Asahan. Kawasan yang dibebaskan untuk hutan budidaya tanaman pinus di desa Sosorladang seluas 225 hektar, dengan ganti rugi Rp.12.500/ha. Sedangkan hutan Sibatuloting, yang merupakan areal konsesi PT. TPL, merupakan kawasan yang pada tahun 1931 (luas sekitar 29.120 hektar) digunakan untuk penanaman hutan pinus oleh pemerintah kolonial Belanda, untuk menghutankan daerah kritis terutama DAS sebagai sumber mata air. Sibatuloting dalam sejarah hutan yang ditulis oleh PCM Fluyt, merupakan hutan lindung yang terlarang untuk dijadikan ladang.

Secara historis, kecamatan Porsea yang termasuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, sepanjang sejarahnya bahwa Sumatera Utara terkenal sebagai kawasan perkebunan. Perusahaan perkebunan telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Konsentrasi perkebunan terletak di areal perbatasan dengan Provinsi Riau, yang meliputi kabupaten-kabupaten Tapanuli selatan, Labuhan ratu dan Asahan. Provinsi Sumatera Utara terletak di jantung pulau Sumatera, termasuk didalamnya kawasan Nias dan kepulauan Batu-Batu.

Berdasarkan lokasi dan lingkungan alamnya, Sumatera Utara dapat dibagi kedalam tiga kawasan, yaitu; kawasan pantai barat, kawasan dataran tinggi di wilayah tengah, dan pantai timur. Sementara Danau Toba merupakan danau air bersih terbesar yang terletak di wilayah tersebut. Sebelum dilakukan pemekaran kabupaten pada awal tahun 1999, Provinsi Daerah tingkat I Sumatera Utara mempunyai luas wilayah sekitar 71.680 km², yang terdiri dari 6 kotamadya dan 13 kabupaten. Alokasi terhadap penggunaan tanah di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh areal hutan.

Dua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu Tapanuli utara (Taput) dan Tapanuli selatan (Tapsel). Pada awal tahun 1999, akhirnya dua kabupaten itu dimekarkan menjadi empat kabupaten. Kedua kabupaten baru itu disebut Mandailing Matal (Madina) dan Toba Samosir (Tobasa)¹. Kabupaten Madina merupakan pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan kabupaten Tobasa adalah pecahan dari kabupaten Tapanuli Utara. Dengan diresmikannya kedua kabupaten baru itu, maka Provinsi Sumatera Utara yang semula hanya terdiri dari 17 daerah tingkat II, akhirnya menjadi 19 daerah tingkat II yang terdiri dari 6 kotamadya dan 13 kabupaten.

¹ Di era reformasi, keinginan warga masyarakat Toba Samosir telah terpenuhi keinginannya, secara otonom telah memisahkan sendiri menjadi kabupaten. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat timbul beberapa isu-isu bahwa otonomi daerah hanya sekedar bagi-bagi kapling jabatan bagi elite-elite tertentu.

Sumatera Utara yang luas wilayahnya sekitar 71.680 km², penduduknya berjumlah sekitar 11 juta jiwa. Karena pesatnya pembangunan di kawasan Timur, maka jumlah penduduk di wilayah ini cukup padat. Kawasan pantai Timur seluas 29.389 km² (41%) berpenduduk 7,1 juta jiwa, dengan kepadatan 245 jiwa/km². Sedangkan Pantai Barat (termasuk Nias) seluas 26.413 km² berpenduduk 1,9 juta jiwa dengan kepadatan 6 jiwa/km². Namun terdapat perspektif lain yang skeptis terhadap pemekaran kabupaten². Perspektif skeptis ini mengedepankan faktor cultural dalam konteks pemekaran kabupaten. Sejak tahun 1998 kabupaten Tapanuli Utara yang disebut sebagai “domain” orang Batak ini, terbagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Toba Samosir dan kabupaten Tapanuli Utara. Dalam kacamata kelompok pesimistis, pemekaran itu merupakan perpecahan. Awal Juni 2002, muncul gerakan untuk pembentukan kabupaten Humbang Hasundutan, melalui kabupaten Tapanuli Utara.

Selain itu, pada bulan Mei 2002, satu rombongan masyarakat Pulau Samosir mendatangi berbagai instansi termasuk kantor DPRD Sumatera Utara menuntut pembentukan kabupaten Samosir yang terpisah dari kabupaten Tobasa. Tuntutan masyarakat Samosir

² Ketidakmerataan penyebaran di pantai Barat dan Timur ini ditandai oleh ketidakmerataan penduduk, yang lebih besar di pantai timur. Penduduk pantai barat urbanisasi ke pantai timur, karena kawasan itu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Industri besar, sarana dan prasarana di pantai timur terus berkembang pesat, namun pembangunan di pantai barat masih seperti jalan di tempat. Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar (1988-1998) memekarkan wilayah kabupaten Deliserdang, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Pemekaran Tapanuli Selatan dan Tapanuli Selatan disebabkan oleh luasnya kedua wilayah itu. Luas Tapanuli selatan 1.889.650 ha, dengan satu wakil bupati dan tiga pembantu bupati, 24 kecamatan (1.500 desa dan 40 kelurahan). Wilayah Tapanuli selatan luasnya sepertiga luas provinsi SUMUT sehingga significant untuk dimekarkan terutama dari sisi rentang kendali dan epektivitas pelayanan masyarakat. Kompas, 5 Januari 2001.

disebabkan karena mereka lebih mampu bila bisa berdiri sendiri, sebab memiliki potensi wisata yang baik. Kemudian muncul pula tuntutan untuk pembentukan Provinsi Tapanuli. Gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli ini banyak dipertanyakan, dikritik, bahkan ditolak oleh banyak pihak, termasuk kalangan Parbato (Partungkoan Batak Toba, Organisasi Musyawarah Batak Toba), karena semata-mata dilakukan untuk mengimbangi usulan pembentukan Provinsi Sumatera Timur yang juga memisahkan dari Provinsi Sumatera Utara³.

Kabupaten Tobasa yang dimekarkan selama ini masuk dalam lingkungan kerja pembantu bupati wilayah IV. Kabupaten Tapanuli Utara selama ini memiliki luas 1.060.530 ha atau 10.605,3 km² termasuk perairan Danau toba seluas 110.260 ha. Dari luas wilayah itu, Tapanuli Utara memiliki 29 kecamatan, 11 perwakilan kecamatan, 31 kelurahan dan 609 desa. Kabupaten Tobasa, sesuai rencana yang telah disusun akan memiliki 12 kecamatan dan lima perwakilan kecamatan. Keduabelas kecamatan yang masuk wilayah Toba Samosir, antara lain Balige, Laguboti, Silaen, Porsea, Habinsaran, Lumbanjulu, Pangururan, Palipi, Onan Runggu, Simanindo, Harian dan Sianjur Mula-mula. Keduabelas kecamatan ini memiliki 298 desa seluas 338.233 ha dan jumlah penduduknya sekitar 300.079 jiwa.

³ Sejak sebagian daerahnya menjadi kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara kehilangan banyak potensi wisata. Danau Toba, sebagian besar menjadi “milik” Kabupaten Toba Samosir. Sekarang, Kabupaten Tapanuli Utara hanya menyentuh Danau Toba di kota kecil Muara, plus Hutaginjang yang melihat danau toba dari ketinggian. Sementara itu, kawasan yang masuk dalam pemekaran Kabupaten Mandailing Natal (Matal), yakni Kecamatan Siabu, Penyabungan, Kotanopan, Muara Sipongi, Batang Natal, Natal, Batahan dan Muara Batanggadis. Sehingga, Matal dengan ibu kota Penyabungan, kini memiliki delapan kecamatan dan Tapanuli Selatan 16 kecamatan, Antara Tapanuli Utara dan Tapanuli selatan tidak jauh berbeda. Tapanuli Utara juga dimekarkan karena luas wilayahnya dan Sumber Daya Alam yang tersedia di sana.

Persiapan pembentukan kabupaten Toba Samosir dengan ibukota Balige dilakukan dengan penataan calon ibukota tersebut sejak beberapa tahun lalu. Dipilihnya Balige menjadi ibukota kabupaten dilatarbelakangi alasan bahwa kawasan itu memiliki potensi yang terus berkembang dari tahun ke tahun, terutama di sektor industri, perdagangan dan pertanian⁴.

2.2. Karakteristik Masyarakat Sekitar Industri

Masyarakat yang tinggal di sekitar Industri TPL umumnya penduduk asli yang telah lama menetap semenjak industri itu belum berdiri. Latar belakang mereka adalah berasal dari etnis Batak yang biasa dikenal mempunyai sikap dan vokal yang keras, tegas, lantang berbicara, tetapi sebenarnya mempunyai hati yang lembut dan toleransi yang tinggi terhadap sesama warga masyarakat. Disamping dihuni oleh penduduk asli, ada juga beberapa kelompok pendatang yang berasal dari etnis lain, seperti Jawa, Minangkabau, dan lainnya. Bahkan di daerah itu, ada perkumpulan masyarakat dari etnis Jawa yang diberi nama “Pujakusuma” (Putra Jawa Kelahiran Sumatera).

Setiap ada inovasi yang diterapkan di daerah, hendaknya masyarakat lokal harus dilibatkan karena umumnya mereka secara tidak langsung ikut memiliki daerah tersebut. Dan paling tidak pendekatan sosial kemasyarakatan harus diutamakan. Kalau tidak, pasti akan terjadi gejolak sosial masyarakat yang cukup tinggi. Seperti halnya, ketika PT. Indorayon berdiri yang dipaksakan oleh pemerintah pusat, warga masyarakat lokal begitu antusiasnya untuk mengusulkan penutupan, tetapi karena saking kuatnya kekuasaan orde

⁴ Tapanuli Utara pernah dijuluki Peta Kemiskinan, dan pemekaran kabupaten dipandang sebagai jalan keluarnya. Masyarakat Tapanuli Utara berharap agar penanganan pembangunan dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Keterlibatan pihak yang tahu benar proses pemekaran dan memahami seluk beluk daerah itu diperlukan untuk menjadikan Tobasa menjadi Daerah Tingkat II.

baru, baru berhasil keinginan masyarakat itu setelah tumbangya Orde baru yang waktu itu presidennya BJ. Habibie dengan Menteri Lingkungan Hidup (Pananggian Siregar). Itu semua bisa terjadi, karena pemerintah pusat dalam mendirikan suatu industri besar, kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Seolah-olah industri itu didirikan hanya untuk kepentingan pemerintah, investor, sehingga dengan dalih secara ekonomi dan politik dapat meningkatkan pendapatan daerah dan dapat mensejahterakan masyarakat lokal.

Kecamatan Porsea, yang termasuk kabupaten Toba Samosir, wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka kondisi masyarakatnya tidak terlepas dari dimensi sosial kultural masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Dari sisi komposisi etnis, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam kelompok sub etnis dengan beragam latar belakang agama. Daerah ini dihuni oleh etnis/suku bangsa yang sangat hiterogen⁵. Salah satu sub etnis, yaitu Batak Toba, telah sangat lama bersentuhan dengan dunia pendidikan, yang diperkenalkan oleh para misionaris Kristen, kurang lebih 134 tahun yang lalu.

Secara antropologis, orang Batak dikenal dalam enam sub-etnis, yaitu Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Angkola, dan Batak Pakpak. Namun dalam kenyataannya, beberapa orang Karo dan Mandailing menolak disebut Batak. Mereka mengaku sebagai orang Karo dan Mandailing, dan sama sekali bukan Batak. Mereka menganggap bahwa orang Batak itu adalah orang Toba, sehingga menyebabkan istilah Batak selalu

⁵ Adapun etnik/suku bangsa asli yang menghuni daerah Provinsi Sumatera Utara itu adalah: (1) Batak-Toba; (2) Karo; (3) Simalungun; (4) angkola/Mandailing; (5) Pakpak/Dairi; (6) Melayu; (7) Nias; (8) Pesisir-Sibolga (Tapanuli Tengah); (9) Lubu; dan (10) Ulu; kesepuluh etnis asli ini mempunyai budaya masing-masing, demikian juga dengan adapt-istiadat, sistem kepercayaan, bahasa, sistem kekerabatan, dan sistem kemasyarakatan.

diidentifikasi khusus untuk Toba⁶. Asumsinya, dengan pergeseran pengertian seperti itu sudah tentu akan menimbulkan pergeseran Budaya diantara keenam etnis itu. Akibatnya beberapa aspek sosial budaya keenam etnis ini (Toba, Karo, Simalungun, Angkola/Mandailing, Pakpak/Dairi dan Nias) yang dahulunya sama ataupun hampir bersamaan sekarang ini sudah jauh berbeda pula.

Bekas-bekas asalnya yang sama diantara keenam etnis ini kondisinya masih terlihat, umpamanya, pada garis keturunan/marga/klen yang berdasarkan garis/pihak laki-laki atau patrilineal. Persoalan etnis ini tampak dalam dimensi ekonomi masyarakat. Ketika Sumatera masih merupakan wilayah yang belum padat penduduknya dan masih dilimpahi oleh sumber daya alam, konvergensi antara garis keturunan dan kepemilikan tanah masih berfungsi. Generasi penerus dapat memisahkan diri dari kelompok induknya (marga) untuk mengembangkan kepemilikan baru, sekaligus menjaga kemurnian garis keturunannya. Jika garis keturunan itu berkembang dengan baik di tanah hunian baru, keluarga lain dapat diundang untuk tinggal di sana dan membentuk sebuah ikatan keluarga melalui perkawinan dengan para penghuni pertama, yang tetap mempertahankan garis kekuasaan terhadap wilayah baru itu.

Demikian halnya dengan terjadinya kasus konflik antara PT. TPL dengan masyarakat sekitar khususnya Porsea dan sekitarnya juga melibatkan dimensi sosial-budaya, selain dimensi politik dan ekonomi. Dalam salah satu sumber disebutkan bahwa konflik antara PT. TPL dengan masyarakat Porsea juga melibatkan unsur manipulasi terhadap unsur-unsur adat di wilayah Porsea. Banyak pihak merasa

⁶ Namun, Tapanuli dan Batak banyaklah bedanya. Orang Karo menolak disebut Batak sebab bahasa mereka memang berbeda dengan bahasa orang-orang yang menghuni kawasan Danau Toba ke arah selatan. Bahasa dan budaya Karo lebih dekat dengan bahasa dan budaya Pakpak yang sama-sama mendiami wilayah di utara Danau Toba. Sementara, bahasa Simalungun, Toba, angkola, dan Mandailing masih sangat mirip.

heran, mengapa perlawanan terhadap kehadiran PT. TPL berlangsung dalam jangka waktu yang panjang kalau dilihat dari waktu sejak masih PT. Inti Indorayon Utama berdiri sampai sekarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses eksploitasi daerah hutan di kawasan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup singkat dengan wilayah yang sangat luas pula. Sementara, aspirasi dan kehidupan masyarakat lokal tanpa diperhitungkan dengan lebih matang.

Sebagai suatu entitas yang terdiri dari beragam sub-etnis, etnis Batak juga memiliki sejarah yang panjang, sekitar 700 tahun. Hal ini mau tidak mau turut mengubah pola hidup orang Batak, yang sebelumnya bergantung kepada alam menjadi lebih maju ke tahapan selanjutnya. Mereka mengenal budaya menulis, membaca, dan mengenal pula teknologi sederhana sampai teknologi maju. Namun, dalam persoalannya menyangkut keberadaan PT. TPL ini, terdapat kritik yang tajam berkaitan dengan pola hidup dan persepsi masyarakat Batak itu sendiri.

Masyarakat yang tinggal di sekitar PT. TPL, memang terlihat mencolok dan mempunyai ciri-ciri tersendiri yakni didominasi oleh etnis Batak. Etnis Batak ini terdiri dari berbagai sub-etnis antara lain etnis Batak Toba, Batak Karo, Batak Nias, Batak Simalungun, Batak Pakpak (lihat tabel 1). Mereka umumnya mengambil peranan penting dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, baik di bidang sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Jadi adat-istiadat, tradisi dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekitar industri tersebut tidak bisa ditinggalkan, meskipun di daerah itu boleh dikatakan berkembang setelah industri berdiri antara lain adanya penduduk campuran yaitu penduduk asli dan pendatang. Seperti halnya, adanya acara-acara kematian, bagi orang yang meninggal dunia sebelum mereka dimakamkan – diadakan upacara terlebih dahulu dengan upacara adat masyarakat Batak yang memakan waktu cukup panjang dan bahkan sampai satu minggu.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Toba Samsir
Menurut Suku Bangsa Tahun 2005

No.	Suku Bangsa	Frekuensi	Persentase
1.	Tapanuli/Toba	295.649	96,71
2.	Nias	1.307	0,34
3.	Karo	613	0,13
4.	Simalungun	521	0,10
5.	Madina	434	0,08
6.	Pakpak	312	0,04
7.	Aceh	301	0,06
8.	Jawa	3.084	0,84
9.	Minangkabau	981	0,22
10.	Melayu	341	0,05
11.	Cina	213	0,04
12.	Lainnya	5.119	1,35
T o t a l		308.875	100,00

Sumber: Karakteristik Penduduk Kabupaten Tobasa, 2006.

Dilihat dari sisi agama yang dipeluk oleh masyarakat sekitar industri TPL, menunjukkan beragam. Namun mayoritas, mereka beragama Kristen Protestan. Kondisi semacam ini, juga tidak terlepas dari faktor sejarah perkembangan daerah itu sendiri. Meskipun agama yang dipeluk oleh warga masyarakat didominasi oleh mereka yang beragama Kristen Protestan, tetapi toleransi beragama cukup tinggi. Tidak pernah terjadi konflik antara warga masyarakat, hanya karena perbedaan agama, mereka saling menghormati antar sesama warga masyarakat. Demikian pula sarana-sarana peribadatanpun di daerah ini tersedia cukup memadai sesuai dengan kebutuhan bagi mereka yang ingin melaksanakan kegiatan ibadah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Toba Samosir
Menurut Agama Tahun 2005

No.	A g a m a	Frekuensi	Persentase
1.	Islam	10.197	3,15
2.	Katholik	71.188	23,21
3.	Protestan	224.855	72,94
4.	Hindhu	13	0,01
5.	Budha	135	0,04
6.	Lainnya	1.987	0,64
T o t a l		308.875	100,00

Sumber: Karakteristik Penduduk Kabupaten Tobasa, BPS, 2006

Dalam era otonomi daerah, berbagai perubahan sudah mulai nampak baik dari segi sosial, budaya maupun ekonomi. Salah satu yang menonjol adalah tumbuhnya gerakan demokratisasi, yang mana masyarakat bebas mengeluarkan pendapat ataupun protes-protes yang sering disampaikan oleh kelompok masyarakat khususnya ditujukan kepada kebijakan pembangunan pemerintah daerah setempat. Dalam kaitan ini, masyarakat yang tinggal di sekitar industri PT. TPL terlihat sekali keberaniannya untuk melakukan protes-protes atau melakukan gerakan-gerakan sosial untuk melawan ketidakadilan khususnya yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

Pihak pemerintah daerah setempat merasa kewalahan, menghadapi warganya yang sering melakukan demonstrasi atau unjuk rasa yang merasa diperlakukan tidak adil. Bahkan pelaku-pelaku demonstrasi itu tidak hanya kaum laki-laki, namun sudah sampai dilakukan oleh kaum perempuan yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan gadis-gadis yang berasal dari penduduk lokal. Kondisi ini menggambarkan bahwa sikap masyarakat lokal, mempunyai sikap yang keras, dan tidak mau diperlakukan secara tidak adil dengan adanya pembangunan. Sebagai contoh, setelah dibukanya kembali industri TPL - tiap hari terjadi demonstrasi-demonstrasi untuk menolak kehadiran TPL. Tuntutan mereka adalah meminta agar PT. TPL segera ditutup karena dinilai telah meresahkan kehidupan

masyarakat, bagi mereka PT. Indorayon yang telah berganti dengan nama PT. TPL sama saja meskipun telah menggunakan paradigma baru.

Gerakan-gerakan itu muncul, sebenarnya didasari oleh rasa ketidakadilan dan sementara kelompok masyarakat lokal sendiri mempunyai ikatan kekerabatan yang kuat. Jadi setiap ada masalah yang dihadapi kelompok-kelompok masyarakat memiliki tingkat solidaritas yang tinggi. Kebersamaan hidup warga lokal khususnya etnis Batak sebenarnya didasari oleh falsafah hidup yang diberi nama Dahlian Natolu. Falsafah Dahlian Natolu adalah pedoman hidup yang diwariskan oleh nenek moyang etnis Batak kepada generasinya (Siagian, 2003). Falsafah ini berisi pandangan tentang makro kosmos dan mikrokosmos atau eksistensi Tuhannya, manusia, dan alam atau lingkungannya. Etnis Batak meyakini adanya Sang Pencipta alam semesta, yang dikenal sebagai “Mulajadi Nabolon”. Mereka juga mempercayai perlunya kerjasama antar individu untuk memelihara kehidupan bersama, alam beserta isinya harus dijaga dan dipelihara untuk kehidupan bersama.

Dalam kaitan falsafah tersebut, diakui bahwa struktur sosial masyarakat etnis Batak terdiri dari 3 unsur yang memainkan peranan, yaitu:

- (1) Hula hula, yang memberikan putrinya sebagai isteri kepada seseorang dari marga tertentu.
- (2) Dongan Tubu, individu-individu yang semarga, dan
- (3) Boru, yaitu marga tertentu yang menjadikan putrid dari marga lainnya menjadi isterinya.

Ketiga unsur tersebut mempunyai otoritas dalam kelompoknya, dan tidak boleh saling mencampuri. Oleh karena itu peranan falsafah Dahlian Natolu ini sangat kuat dalam menghadapi modernisasi yang berasal dari dunia luar, dan tidak mudah digoyahkan dengan begitu saja, kalau dipaksakan goyah oleh pihak

luar akan terjadi perlawanan-perlawanan warga masyarakat lokal yang cukup dahsyat pula.



HUBUNGAN SOSIAL DAN KONFLIK MASYARAKAT LOKAL

Industrialisasi yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, perusahaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi masyarakat secara luas. Pengaruh tersebut bisa berupa nilai-nilai, sistem tingkah laku, organisasi sosial dan pola-pola hubungan sosial masyarakat lokal. Industri dapat memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang tercermin pada sikap kehidupan masyarakat dalam kesehariannya.

Pola-pola lama pada kehidupan masyarakat setempat, seperti pola perkawinan, status sosial, hubungan sosial akan menyesuaikan dengan arus modernisasi yang dipengaruhi oleh industrialisasi (PMB-LIPI, 1994). Pada sisi lain, percampuran penduduk antara yang telah lama menghuni di daerah sekitar industri dengan pendatang baru yang bermacam-macam latar belakang asal-usul dan etnisnya menambah heterogenitas sosial. Dengan demikian antara penduduk asli dan pendatang maupun antara sesama pendatang akan bergabung dan membentuk masyarakat baru dan menyesuaikan kehidupan dengan struktur sosial yang baru pula. Jika demikian halnya, tentu saja pola-pola kehidupan sosial yang masih bersifat tradisional baik cepat maupun lambat akan memudar untuk menuju pola hidup yang lebih dinamis dan moderen. Namun demikian masyarakat setempat juga akan mempengaruhi terhadap keberadaan industrialisasi itu sendiri.

3.1. Hubungan Masyarakat Lokal Dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL).

Dengan operasinya kembali PT. TPL pada awal tahun 2003, yang merupakan kelanjutan dari PT. Inti Indorayon Utama, telah menciPT.akan polarisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar industri PT. TPL. Polarisasi yang terjadi di Daerah sekitar industri antara lain pada satu sisi masyarakat ada yang mendukung operasinya kembali PT. TPL (kelompok Pro), dan pada sisi lain ada pula kelompok masyarakat yang menentang operasinya kembali PT. TPL (kelompok Kontra). Kedua kelompok tersebut terhadap keberadaan TPL mempunyai pandangan yang kontradiksi. Sementara Ketika PT. Indorayon beroperasi sejak tahun 1988-an belum terlihat pengelompokan antara mereka yang Pro dan Kontra, melainkan terlihat mayoritas masyarakat menolak kehadiran PT. Indorayon beroperasi.

Bagi masyarakat yang menolak beroperasinya PT. TPL mengekspresikan penolakan itu melalui demonstrasi-demonstrasi di Daerah Porsea dan sekitarnya dan bahkan sampai ada yang melakukan di pusat ibukota Provinsi Sumatera Utara (kota Medan). Sedangkan demonstrasi yang terjadi di Porsea, terkonsentrasi di Simpang Sirait Uruk tepatnya di simpang jalan raya yang juga merupakan pintu utama keluar masuknya kendaraan-kendaraan operasional PT. TPL. Pemilihan Simpang itu sebagai tempat konsentrasi demonstrasi menjadi sangat strategis dan praktis karena lokasi itu sebagai jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Balige – Medan dan Jakarta. Dengan demikian bagi masyarakat umum yang melewati jalan tersebut akan dengan cepat mengetahui bentuk perlawanan sebagian kelompok masyarakat lokal sehingga gaungnya akan lebih cepat tersebar luas. Pelaku-pelaku demonstrasi itu mayoritas dilakukan oleh kelompok perempuan baik ibu-ibu rumah tangga maupun gadis-gadis yang berasal dari penduduk lokal.

Demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lokal itu, sampai tim peneliti melakukan penelitian lapangan masih

berlangsung terus, bahkan setiap hari semakin meningkat animonya. Mereka berjuang mati-matian demi mempertahankan daerahnya dengan tuntutan TPL harus ditutup. Banyak korban berjatuh, sementara pihak PT. TPL untuk mengatasi demonstran ini cenderung menggunakan kekerasan yakni memperlak aparat keamanan (Brimob). Brimob ini masih terus berjaga-jaga di Simpang Sirait uruk dan bahkan kadang-kadang suka melakukan teror terhadap masyarakat lokal.

Menurut data yang dihimpun Kelompok Perjuangan Rakyat Tobasa Untuk Tutup Indorayon/TPL (juni,2003), bahwa kondisi di Simpang Sirait Uruk sebagai tempat para demonstran terhadap tutup TPL, aparat Brimob telah banyak melakukan bentuk kekerasan dalam menanganinya. Bahkan banyak korban-korban yang jatuh akibat penanganan yang cenderung dengan kekerasan ini. Contoh kasus, atas kejadian tgl 29 Maret 2003, tentang bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan (lihat tabel 3). Para demonstran ini, umumnya dilakukan secara bergiliran dari jam 10.00 – sore hari, yang umumnya pada tahap terakhir ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga.

Tabel 3 Identifikasi Korban dan Bentuk Kekerasan

No.	Nama/Identitas	Bentuk Kekerasan	Tempat	Keterangan
1.	15 Orang Ibu-ibu rumah tangga	Ditabrak oleh Truk Brimob Polri	Simpang Siraituruk	Luka pada tangan, kaki, wajah dan dirawat RS
2.	Op.Risma br.Manurung (70th)	Ditembak oleh Brimob di telapak tangan kiri	Simpang Siraituruk	Dirawat di RS Harapan Kita,Pmtng siantar
3.	PasturIvo Sinaga (40 th)	Diseret dan dipukuli dengan pentungan dan senjata	Simpang Siraituruk	Luka-luka di seluruh tubuh,khusus nya pada kepala

4.	Toga Sitorus (40 th)	Diseret dan dipukuli dengan pentungan dan senjata	Simpang siraituruk	Ditahan di Polsek Porsea
5.	J. Huta Uruk (35 th)	Diseret dan dipukuli dengan pentungan dan senjata	Simpang siraituruk	Mengalami luka di dada dan kepala
6.	T. Manurung	Dikejar, diseret, dipukuli pentungan dan senjata	Simpang Siraituruk	

Sumber: Laporan Kelompok Perjuangan Rakyat Tobasa Untuk Tutup TPL, 2003

Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang mendukung keberadaan PT. TPL lebih banyak cenderung tutup mulut, dikarenakan merasa takut diserang oleh kelompok mereka yang kontra terhadap TPL. Hal itu dimaksudkan supaya diantara yang Pro dan Kontra tidak lagi terjadi benturan secara fisik yang dapat mengakibatkan jatuhnya kembali korban di kedua belah pihak, yang sama-sama sebagai penduduk lokal. Perang urat-syaraf sebenarnya sudah sering terjadi antara kelompok yang Pro dan Kontra yaitu melalui sindiran-sindiran yang dilakukan oleh kelompok kontra terhadap kelompok Pro. Salah satu sindiran itu adalah mereka yang Pro-TPL dikatakan kelompok angka 93. Angka itu artinya disesuaikan dengan "Penjilad". Angka 93 itu, nampaknya sudah populer di kalangan masyarakat sekitar industri TPL khususnya di Daerah Porsea, sehingga orang yang merasa dirinya masuk kelompok 93 ada perasaan malu sendiri di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan diasingkan dari kehidupan mereka.

Ketika suasana ketegangan masih memanas antara kelompok yang Pro dan Kontra, mereka yang Pro sering teraniaya secara psikis dengan adanya teror, rumah-rumahnya sering dicoret-coret dengan angka 93, dan bahkan ada yang diancam ingin dibakar. Akibat

ketegangan-ketegangan yang terjadi antara yang Pro dan Kontra, itu akhirnya menimbulkan Lembaga Dahlian Natolu yang merupakan ikatan kekerabatan dan falsafah hidup masyarakat Batak mulai memudar atau kurang berfungsi. Tidak berfungsinya lembaga ini adalah akibat mereka yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengurus lembaga ini terpecah belah menjadi dua, pada satu sisi ada yang ikut kelompok Pro dan lainnya ikut kelompok kontra. Para tokoh-tokoh yang merasa dirinya diuntungkan, seperti anaknya bisa bekerja di TPL, cenderung mereka ikut yang Pro TPL. Hal ini menjadi permasalahan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, karena dahulu sebelum ada TPL mereka menjadi tokoh panutan, sekarang telah luntur dan berpihak kepada pihak yang mampu memberi uang (TPL).

Dengan demikian secara tidak langsung, kehadiran industri PT. TPL telah merusak pranata sosial dan kebudayaan masyarakat lokal dimana sistem kekerabatan Dahlian Natolu tidak bisa berbuat banyak, boleh dikatakan sistem kekerabatan tersebut lama-kelamaan akan menghilang. Masyarakat lokal telah terkonsentrasi atas kelompok pro dan kontra kehadiran TPL di Porsea. Sistem kekerabatan dan falsafah hidup yang didasarkan pada prinsip Dahlian Natolu seharusnya dihormati oleh PT. TPL untuk menarik simpati, karena masyarakat lokal adalah orang BatakToba sebagai pendukung sistem kekerabatan tersebut.

Keberadaan PT. TPL di Porsea ini, maka telah terjadi pengelompokan-pengelompokan masyarakat lokal. Namun secara umum, tetap masih banyak kelompok yang Kontra terhadap TPL. Kelompok kontra TPL, umumnya beralasan bahwa kehadiran PT. TPL di Porsea adalah penipuan, nama berbeda dengan Indorayon, tetapi dalamnya sama, atau orangnya sama bajunya berbeda. Akibat adanya TPL justru membawa bencana bagi kehidupan masyarakat lokal. Banyak korban penduduk meninggal dunia yang berasal dari Porsea, korban luka, dan teror sudah ratusan merasa hidupnya tidak tenang. Semuanya itu, lalu timbul perasaan bahwa masyarakat lokal sudah tak percaya lagi terhadap TPL dan senantiasa menolak ketika

diajak berdialog oleh pihak TPL. Rumah-rumah penduduk milik kelompok kontra TPL, seperti di Sirait Uruk, Lumban Hurning, selalu diberi tulisan “No Dialog” Tolak Indorayon-Tutup TPL. Tulisan-tulisan itu sebenarnya sudah menunjukkan antipatinya terhadap keberadaan TPL, dan selalu teringat peristiwa-peristiwa pahit masa lalu ketika Indorayon masih beroperasi yang dampaknya telah meresahkan kehidupan mereka.

Nampaknya tinggal di Daerah Porsea dan sekitarnya perasaan kurang nyaman akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh PT. TPL hampir dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Kecuali oleh mereka yang merasa dirinya diuntungkan oleh PT. TPL, meskipun sebenarnya telah terjadi pencemaran selalu mengatakan tidak ada pencemaran yang berarti. Hal ini wajar tinggal di daerah sekitar industri, yang penting masyarakat sekitar dapat merasakan manfaatnya. Alasan-alasan itu biasanya dikemukakan oleh mereka yang pro TPL, dan telah mendapatkan keuntungan dari pihak TPL.

Sebenarnya korban-korban yang ditimbulkan oleh PT. TPL bukan hanya di pihak manusia, namun juga melanda mata pencaharian warga masyarakat lokal. Seperti kasus tanah pertanian yang semakin tandus, berbeda ketika PT. Indorayon belum beroperasi. Bagi masyarakat peternak juga merasakan dampaknya, seperti ternak babi, ikan mas, kerbau, banyak yang mati. Kondisi yang demikian, warga masyarakat lokal mengatakan tidak ada jalan lain daerah ini akan makmur apabila PT. TPL segera ditutup. Sakit hati masyarakat lokal sudah semakin dalam, perasaan kecewa, sikap antipati terhadap TPL, karena dilihat dari beberapa aspek kehidupan merasa dirugikan oleh PT. TPL.

Kelompok masyarakat lokal yang Pro terhadap TPL umumnya berasal dari berbagai kalangan, antara lain: pejabat pemerintah daerah Tobasa baik dari tingkat kabupaten, kecamatan dan beberapa anggota masyarakat lokal yang merasa diuntungkan, seperti tokoh masyarakat yang anggota keluarganya bekerja di TPL, mitra kerja TPL seperti: pemborong. Pandangan kelompok yang pro TPL ini biasanya

memberi warna lain yaitu tetap mendukung keberadaan TPL. Dengan adanya paradigma baru menurut mereka menjelaskan bahwa TPL telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat lokal untuk ikut ambil bagian dalam kesempatan produksi di PT. TPL. Kondisi TPL sudah tidak seperti Zaman Indorayon, dimana akses masyarakat lokal sangat kecil untuk bisa masuk ke TPL. Namun sekarang, masyarakat lokal melalui PT. TPL dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu, pandangan mereka terhadap keberadaan PT. TPL akan mendapat prospek yang lebih baik di masa mendatang. Umpamanya kalau TPL ditutup, hal itu akan menimbulkan preseden buruk bagi usaha pemerintah untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian pula tenaga kerja dari penduduk lokal yang sudah bekerja di TPL akan sengsara karena terkena PHK – dan tentu saja akan menambah masalah bagi mereka. Kalangan pro buka ini terkesan sebagai juru bicara TPL, baik mereka yang duduk sebagai pejabat di TPL, duduk di pemerintahan ataupun masyarakat biasa.

Kesan itu timbul pada waktu mereka menerangkan keberadaan TPL dalam kaitannya dengan lingkungan dan demonstrasi-demonstrasi yang menentang TPL. Menurut mereka, pencemaran yang ditimbulkan oleh sebuah industri besar seperti TPL merupakan sesuatu yang wajar di mana-mana dan tak perlu dipersoalkan. Tak ada sebuah pabrik dimanapun berada yang daerah sekitarnya akan terkena rasa bau sesuatu atau bahan kimia lainnya. Namun rasa bau itu sesuatu hal yang wajar dan tak berpengaruh terhadap kesehatan, hendaknya jangan didramatisir kondisi lingkungan semacam ini. Demikian pula, dengan adanya demonstrasi-demonstrasi yang menentang TPL itu juga dikarenakan ada yang menggerakkan dan yang menggerakkan itu juga mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Menurut mereka, bahkan mengatakan ada perusahaan industri besar sekitar TPL yang membiayai dan menggerakkan demonstrasi tersebut, perusahaan itu adalah PT. Inalum, karena PT.

itu mempunyai kepentingan agar tidak tersaingi oleh kehadiran PT. TPL.

3.2. Hubungan Pemerintah Dengan PT. TPL

Berdirinya suatu industri besar nampaknya tidak lepas dari peranan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah lokal/daerah yaitu kabupaten, kecamatan sampai tingkat kelurahan setempat yang wilayahnya dijadikan sebagai lokasi industri. Oleh karena itu keberadaan industri itu seharusnya tidak lepas kontrol oleh pemerintah, didalam perkembangannya. Secara ekonomi, di suatu daerah semakin banyak perusahaan Industri - akan semakin maju daerahnya, karena sumber pendapatan yang masuk berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.

Industri PT. TPL berlokasi di wilayah kecamatan Porsea, kabupaten Toba Samosir. Pengawasan ataupun monitoring perkembangan industri tersebut, tentu saja peran Camat maupun kepala desa cukup mengetahuinya. Namun demikian, dengan terjadinya polarisasi sosial antara yang Pro dan kontra terhadap TPL di tengah-tengah kehidupan masyarakat, nampaknya aparat-aparat pemerintah daerah kurang pro aktif melakukan penyelesaiannya. Mereka ada indikasi, lebih berdiam diri daripada ikut terlibat kepada kelompok yang pro maupun kontra, hal ini kemungkinan karena untuk mencari keselamatan diri dan seolah-olah ada kecenderungan berpihak kepada yang Pro. Menurut keterangan Key informan, bahwa umumnya aparat pemerintah seperti Camat, bupati atau pegawai pemerintah daerah kabupaten/kecamatan, lebih mendapat kemudahan untuk masuk ke wilayah kantor TPL. Sementara masyarakat lokal, agak dipersulit untuk berkomunikasi atau masuk wilayah TPL. Bagi yang ingin masuk ke wilayah pabrik di TPL harus diperiksa secara ketat dengan syarat-syarat seperti KTP atau identitas lainnya.

Apabila diperhatikan secara seksama, hubungan antara aparat pemerintah dengan pihak TPL terlihat cukup baik dan tidak ada masalah yang berarti, meskipun hubungan warga masyarakat

sekitarnya dengan TPL kurang harmonis. Pemerintah menganggap dengan hadirnya TPL, hanya melihat kepentingan investasi semata dan dampaknya selain dapat meningkatkan pendapatan Daerah, juga menyerap tenaga kerja penduduk setempat. Akan tetapi, mereka kurang memahami betul bagaimana kondisi sosial penduduk lokal, seperti sampai sejauhmana penduduk lokal yang terlibat produksi, dampak terhadap lahan pertanian yang dimiliki penduduk, adat-istiadat, dan lainnya.

Namun sebaliknya, pihak TPL berpendapat betul bahwa kehadirannya di Daerah ini sangat menguntungkan masyarakat dan secara hukum telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan bahkan pemerintah telah menyambut baik, dari tingkat pusat sampai kecamatan, tidak menemui hambatan yang berarti. Penduduk lokal pun sebenarnya menyambut baik dengan kehadiran TPL ini, kecuali kalau terjadi demonstrasi-demonstrasi itupun karena ada yang menghasut dan membiayai. Mereka yang membiayai karena mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu, seperti LSM-LSM, kelompok-kelompok elite, dan bahkan ada perusahaan besar tertentu.

Menurut pihak TPL, sebenarnya dengan adanya paradigma baru telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kepentingan penduduk lokal. Kontribusi dan komitmen sosial bahkan sejak masih PT. Indorayon telah dilakukan kepada daerah sekitar bekerjasama dengan pemerintah, meskipun hasilnya belum maksimal. Adapun kontribusi sosial yang telah diberikan antara lain:

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana. Sampai saat ini telah dibangun jaringan jalan Indorayon 1,949 km dalam pembangunan HTI murni, dan 286 km jalan untuk HTI-PIR. Disamping untuk kepentingan HTI Indorayon, pembangunan jaringan jalan ini secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan keterbukaan wilayah dan desa-desa di dalam dan sekitar kawasan HTI. Banyak desa yang dapat dicapai dengan kendaraan roda empat antara lain: Desa Janji Maria, Parlombuan, Natinggir, Sibide, Siborboran, Sait Nihuta, Parmonangan. Seiring dengan

hal itu, sepanjang jalan yang dibuka tumbuh areal-areal produksi pertanian baru yang membantu pembangunan jaringan listrik masuk desa.

- (2) Pembinaan mitra kerja pengusaha kecil lokal. sejalan kebijaksanaan perusahaan dalam rangka pembinaan mitra kerja pengusaha kecil local yang tersedia dan potensial untuk terlibat dalam operasional pabrik dan HTI, maka mayoritas mitra kerja berasal dari Daerah setempat. Bidang usaha kemitraan yang melibatkan pengusaha lokal saat ini mencakup jasa-jasa transportasi kayu, penebangan, borongan, dan lain-lain.
- (3) Pembinaan mitra kerja pengusaha kecil lokal. Sejalan kebijaksanaan perusahaan dalam rangka pembinaan mitra kerja pengusaha kecil lokal yang tersedia dan potensial untuk terlibat dalam operasional pabrik dan HTI, maka mayoritas mitra kerja Indorayon berasal dari daerah setempat. Bidang usaha kemitraan yang melibatkan saat ini mencakup jasa-jasa: transportasi kayu, penebangan, borongan, suplai material, manpower, dan lain-lain, dengan total nilai di tahun 1996 sebesar Rp.25,6 miliar, Rp.23,5 miliar di tahun 1997, dan Rp.10,4 miliar sampai bulan Mei 1998.
- (4) Bidang pendidikan (pemberian beasiswa, praktek kerja lapangan (PKL), kegiatan cerdas cermat, dan lain-lain). Kontribusi di bidang pendidikan dilakukan melalui program beasiswa, perbaikan sekolah, kesempatan PKL bagi siswa SLTA dan mahasiswa, studi banding siswa/mahasiswa, dan sebagainya yang secara rutin hampir setiap bulan.
- (5) Kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya berupa bantuan di bidang keagamaan, perbaikan permukiman, bantuan ke panti asuhan, dan lain-lain.
- (6) Partisipasi dalam kegiatan sosial Budaya, antara lain: (a) Bantuan kepada rumah-rumah ibadah, dana dan partisipasi aktif dalam kegiatan perayaan hari besar agama dan lain-lain. (b) Bantuan

dana kepada Ormas/OKP. (c) Bantuan bencana alam/kebakaran. (d) Pembinaan kesenian dan Budaya (Festival group,). (e) Pembinaan Olahraga (bantuan peralatan). (f) Pembagian warta Indorayon kepada masyarakat. (g) Pengadaan pasar murah sembako h) Pelaksanaan dialog bulanan.

- (7) Pengembangan masyarakat: (a) Pembangunan sarana air minum, bantuan air minum dan pengairan sawah dalam rangka mengatasi kemarau panjang (sejak tahun 1998). (b) Pembangunan gapura kota dan halte, pembuatan papan nama jalan, penerangan jalan-jalan umum, pembangunan selokan, perbaikan jalan dan jembatan, perbaikan permukiman, dan lainnya, (c) Bantuan bibit penghijauan, alat-alat pertanian, dan lain-lain. (d) pemberian beasiswa untuk tingkat SLTA se kecamatan Porsea.
- (8) Peningkatan Produktivitas masyarakat: (a) Kesempatan berusaha (pembinaan pengusaha kecil sebagai mitra usaha). (b) Kesempatan berkaryam dan latihan (PKL/magang untuk siswa sekolah kejuruan se Tapanuli, Perguruan Tinggi di Sumatera/Jawa). (c) Pembinaan Bina Usaha (B.U) Kelompok Tani (jagung/kentang), BU Perikanan Ikan Mas, BU Ternak Ayam. Pembinaan Pengrajin Sapu Ijuk, dan lain-lain. (d) Kesempatan Lapangan Kerja.

Bantuan-bantuan sosial yang telah diberikan di atas, dilihat secara program telah menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat lokal. Namun demikian, realisasinya masih perlu dipertanyakan, dan kemungkinan secara prosedural dan kewajiban-kewajiban secara formal telah dianggap baik oleh pihak pemerintah Daerah, sehingga tidak menimbulkan masalah. Kepentingan masyarakat lokal, kemungkinan sebagian besar belum terpenuhi dan kurang proporsional, seperti bantuan beasiswa, bantuan kesehatan, kesempatan kerja, secara menyeluruh masih banyak yang dirugikan.

Pada sisi lain, menurut keterangan dari warga desa, bahwa akhir-akhir ini setelah Indorayon berganti dengan TPL, semua kepala desa di sekitar TPL ada kecenderungan memihak kepada warga

masyarakat. Sementara pejabat kecamatan, kabupaten lebih memihak kepada TPL. Hal ini terbukti, setiap ada permasalahan khusus yang menyangkut kepentingan warga lokal yang ada kaitannya dengan TPL, seolah-olah mereka terkesan membela kepentingan TPL dan bahkan boleh dikatakan berkapasitas sebagai *Juru Bicara TPL*¹. Apa yang dikatakan mereka, bahwa TPL berada di daerah ini sudah benar, karena dapat membantu kehidupan warga masyarakat setempat, kalau TPL tutup berarti akan merugikan warga masyarakat yang telah bekerja di TPL. Tetapi mereka tidak memperdulikan kesengsaraan masyarakat setempat yang diakibatkan oleh TPL, banyak kerbau mati, hasil panen berkurang, sehingga pendapatan warga masyarakat berkurang dan berbeda jauh ketika Indorayon belum berdiri.

Kondisi yang demikian, mengakibatkan warga masyarakat setempat khususnya yang kontra TPL sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah khususnya pejabat di lingkungan kantor kecamatan. Warga masyarakat lebih berlindung kepada kepala desa, yang benar-benar melindungi kepentingan warga, setiap ada masalah ada kecenderungan di musyawarahkan di tingkat desa. Sejak terjadi demonstrasi antara kelompok kontra TPL dengan pihak kecamatan, pada bulan November 2002, di halaman kantor kecamatan, pihak Camat terlihat sekali memihak TPL, karena semua aspirasi warga tanpa diperhatikan. Buntut demonstrasi itu, akhirnya terjadi pengrusakan kantor kecamatan meskipun sebenarnya yang melakukan itu bukan warga setempat, tetapi provokator atau oknum yang sengaja memperkeruh suasana-yang seolah-olah warga yang kontra TPL sudah anarkhis².

¹ Wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar PT. TPL, dan yang terkena dampak langsung oleh TPL. Mereka menuturkan kejadian yang sebenarnya dan penderitaan yang selama ini dialaminya, demikian pula mereka tahu persis kronologis kejadian-kejadian dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal akibat adanya PT. TPL.

² Sebenarnya sikap warga masyarakat sekitar PT. TPL yang mengaku dirinya kontra TPL, tidak sekejam yang dituduhkan oleh pihak

Akibat kejadian tersebut, ternyata membawa konsekuensi-konsekuensi bagi warga masyarakat local. Hubungan antara warga masyarakat dengan pihak kecamatan terjadi kerenggangan khususnya bagi warga yang dicurigai sebagai kontra TPL. Akibat dicurigai, setiap warga masyarakat yang ingin mengurus KTP tidak dilayani atau dipersulit dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Sementara sebelum ada kejadian tersebut tidak mengalami masalah. Hal ini menggambarkan bahwa, pihak pemerintah di tingkat kecamatan membina hubungan yang baik dengan PT. TPL, tetapi lepas dari keterlibatan dalam kelompok baik yang Pro maupun Kontra.

3.3. Konflik Masyarakat Lokal Dengan Pihak Industri

Dengan kehadiran industri besar di suatu daerah pasti akan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat lokal yang tinggal di daerah tersebut. Bagi yang pro akan tumbuh adanya kerjasama, yang mana kerjasama ini biasanya akan melahirkan komunikasi yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang berinteraksi atau kedua belah pihak. Namun apabila tidak terjadi keharmonisan atau perbedaan yang tidak ada kesepakatan akan menjurus terjadinya konflik. Konflik akan menjelma apabila kondisi persaingan menjadi berlarut-larut dan masing-masing pihak tidak dapat mencapai suatu kesepakatan penyelesaian dan saling pengertian. Dengan kata lain bahwa konflik merupakan wujud dari tumbuh suburnya perbedaan-perbedaan kepentingan.

Namun demikian konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan industri besar, hal ini dikarenakan masyarakat lokal dirugikan oleh kehadiran industri besar. Konflik ini terjadi secara besar-besaran antara masyarakat dengan pihak industri, dan bahkan pihak industri menggunakan jalan kekerasan dengan memanfaatkan aparat

pemerintah yang katanya sudah mulai Anarkhis. Perbuatan itu sebenarnya sudah dimasuki oleh pihak ketiga atau katakanlah sebagai provokatorlah.

kepolisian untuk melawan masyarakat lokal yang dianggapnya menentang kehadiran industri besar tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh pernyataan sikap Kepala Desa Tobasa (Toba Samosir) bahwa kehadiran PT. Indorayon/TPL telah membawa bencana bagi rakyat khususnya masyarakat lokal atau masyarakat yang tinggal di sekitar industri besar. Semenjak 20 tahun berdirinya PT. Inti Indorayon Utama (IIU) di Porsea telah banyak menimbulkan penderitaan bagi rakyat Porsea. Orde Baru yang dipaksakan pendiriannya walaupun semenjak awal banyak kalangan baik dari intelektual, tokoh-tokoh, mahasiswa, aktifis NGO maupun warga masyarakat Porsea sendiri telah melakukan protes karena perusahaan multi corporation yang terbesar di Asia itu menghasilkan Pulp dan rayon bahkan secara diam-diam memproduksi bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Kemudian PT. IIU dalam proses produksinya memakai teknologi Clhorine yang di negara asalnya (Finlandia) tidak dipakai lagi karena tidak ramah lingkungan. Disamping itu juga keberadaan pabrik berada pada lokasi cekungan yang diapit pegunungan dan di daerah pemukiman masyarakat. Sebagai akibatnya terjadi pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi pabrik. Topografi Tobasa sendiri berada pada kemiringan lahan yang sangat curam justru dimanfaatkan PT. IIU untuk melakukan eksploitasi kayu sebagai bahan baku pabriknya, sehingga mengakibatkan terjadinya pengeringan air sungai, longsor, erosi tanah bahkan mengakibatkan penurunan permukaan air Danau Toba.

Dengan melihat realitas diatas masyarakat Toba Samosir dan kalangan intelektual maupun mahasiswa melakukan protes terus menerus kepada pemerintah untuk merubah kebijakannya tentang keberadaan PT. IIU di Porsea. Akan tetapi Yang terjadi, justru pihak industri merespon tuntutan masyarakat dengan cara-cara yang arogan dan refresif dengan memakai aparat keamanan. PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang telah berubah nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari

(TPL) seperti dari dahulu sampai sekarang tidak berubah sikap dan arogansinya. Kesalahan masa lalu sepertinya tidak menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan di bawah kendali pemodal Sukanto Taqnoto (big bos Raja Garuda Mas/RGM Group) ini. Pada hal sejak awal perusahaan ini tidaklah layak beroperasi di Porsea, Toba Samosir dan tidak diterima oleh masyarakat Porsea dan sekitarnya. Pada kenyataannya bahwa perusahaan ini dipaksakan oleh pengusaha yang didukung sepenuhnya oleh Pejabat/Penguasa Orde Baru.

Pada pemerintahan dengan presiden BJ Habibie akhirnya PT. IIU ditutup sementara waktu akibat dari tuntutan masyarakat dan berbagai kalangan, begitu juga pada zaman pemerintahan Abdurachman Wahid (Gusdur). Akan tetapi pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri kembali PT. Inti Indorayon Utama malah diijinkan untuk beroperasi kembali. Hal ini terjadi sejak munculnya hasil sidang kabinet bidang Ekuin yang dipimpin oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa PT. IIU yang ditutup adalah rayon dan tetap membuka produk pulp (Maret 2000), permasalahan semakin pelik dimana pihak IIU terus gencar memaksakan kehendaknya dengan slogan "*Paradigma Baru*" untuk mengoperasikan pabriknya, maka penderitaan dan penindasan masyarakat lokal semakin terus terjadi.

Adapun kesalahan-kesalahan dan berbagai bentuk penindasan yang dilakukan oleh PT. Inti Indorayon Utama adalah sebagai berikut:

a. Sisi Lingkungan Hidup

(1) Letak Pabrik dan Lokasi Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI).

- Letak pabrik berada pada bukit dan memiliki topografi yang sangat tidak memungkinkan dibangun sebuah industri pulp dan rayon, letak pabrik berada pada pemukiman penduduk. Selain itu pabrik berada persis di hulu sungai Asahan (salah satu sungai yang mengalir ke

beberapa kabupaten seperti kabupaten Asahan dan sebagian Tapanuli Utara, sehingga ini berdampak pada lingkungan dan kehidupan penduduk yang berada di sekitar dan hilir sungai.

- Lokasi konsesi HTI yang diberikan kepada PT. IJU terletak di 5 (lima) kabupaten seperti Dairi, Tobasa, Simalungun, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Empat dari lima kabupaten tempat HTI IJU adalah merupakan daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba (dulu sempat menjadi danau terkenal di dunia karena banyak dikunjungi turis asing dan domestik).

(2) Pencemaran

- Sebagai sebuah industri IJU tidak memiliki persyaratan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan seperti persyaratan AMDAL seperti yang dipersyaratkan oleh saat itu PP-AMDAL 1986. peraturan itu sekarang diganti dengan PP No.27 tahun 1999, padahal sejak awal ini sudah dipersoalkan oleh WALHI dan LBH.
- Dampak lingkungan yang pernah terjadi antara lain: a) Tanggal 9 Agustus 1988, Aerated Lagoon (Waduk penampung limbah) pecah/jebol dan mencemari Sungai Asahan, yang menyebabkan banyak ikan mati dan biota sungai mati. b) Tahun 1991 Bapedal menemukan saluran ilegal pembuangan limbah yang tidak melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sehingga limbah dibuang langsung ke sungai Asahan tanpa proses atau netralisir. c) Tanggal 5 Nopember 1991 tabung gas chlorine (CS₂) PT. IJU bocor. Terjadi pencemaran udara di Porsea dan sekitarnya. Puluhan ribu warga masyarakat Porsea ketakutan, kucar-kacir, dan mengungsi ke berbagai kota di daerah lain. Ratusan ternak seperti ikan, babi, kerbau, ayam, itik dan lain-lain, banyak yang mati

sebagai dampak tersebut. d) Tanggal 2 Maret 1994, untuk kedua kalinya Aerated Lagoon pecah, kembali membuat masyarakat panik dan pencemaran sungai Asahan terjadi lagi. Pemerintah memutuskan untuk melakukan audit total dan menunjuk Auditor Labat Anderson (Amerika Serikat) untuk mengaudit total PT. IIU. Hasil audit itu tidak pernah dipublikasikan secara luas. Akan tetapi isi dari audit itu membenarkan bahwa IIU melakukan poluswi limbah gas, limbah cair dan limbah padat yang sangat berbahaya bagi warga sekitar.

(3) Hutan

PT. IIU adalah sebuah industri yang berbasis kayu. HTI dan HPH Indorayon pun sejak awal bermasalah dan bertentangan dengan beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa masalah yang menyangkut persoalan hutan adalah:

- Letak lahan konsesi dan areal kerja HTI/HPH IIU berada hamper sebagian besar berada pada kemiringan lahan yang sangat curam (diatas 40 persen).
- Selain itu areal kerja dan konsesi hutan IIU berada pada kawasan daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba sehingga sangat mempengaruhi terhadap ekosistem Danau Toba itu sendiri (ketersediaan air, longsor dan banjir yang tak terkendali).
- PT. IIU tidak memiliki areal HTI dan HPH yang cukup untuk mmenuhi kapasitas produksi terpasangnya. Menurut Direktorat Jenderal Hutan, sejak awal PT. IIU hanya memiliki areal efektif sebesar 41.000 ha, sementara areal efektif yang dibutuhkan sebesar 97.500 ha. Hal ini sangat janggal sementara IIU dapat eksis bertahan dan memproduksi sekian lama. Dengan kenyataan yang demikian dan fakta yang terjadi di lapangan PT. IIU telah sejak lama pula melakukan aktifitas illegal (illegal

logging) antara lain dengan cara menebangi hutan alam yang ada di dekat areal kerjanya dan menampung kayu-kayu ilegal dari berbagai tempat.

- Menebang di luar konsesi dan wilayah kerja tidak sesuai dengan peta konsesi yang ada di lapangan yang tersedia.
- Perampasan secara paksa dan pengambilan hutan adat / hutan milik warga masyarakat. Seperti yang terjadi pada kasus hutan adaPT./ulayat keturunan Raja Sidomdom Barimbing di deswa Sugapa terjadi pada bulan Oktober 1987 (kasus ini banyak diberitakan oleh berbagai media dan kasus ini sempat me-nasional karena para Ibu atau Inang pada waktu itu berhasil ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan mengadakan permasalahan perampasan lahan atau tanah adat ini.

b. Hukum

(1) Peraturan Perundangan

Dari segi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, letak PT. IJU sebagaimana tersebut di atas telah melanggar beberapa peraturan teknis dan perundangan terkait seperti:

- SK Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup tanggal 1 Juni 1985 yang ditandatangani oleh Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup tanggal 1 Juni 1985 yang ditandatangani oleh Menteri KLH Prof.Dr.Emil Salim mengenai lokasi pabrik pulp dan rayon tersebut, mengisyaratkan agar lokasi pabrik berada pada lokasi/zona industri seperti di Kuala Tanjung atau Tanjung Balai dengan resiko lingkungan paling terkecil.
- SK Menteri Kehutanan No. 236/KPT.S-IV/84 tanggal 19 Nopember 1984 mengenai jangka waktu penghasilan pulp dan rayon serta penggunaan bahan baku Pinus Merkusi.

- Surat Menteri Pekerjaan Umum No.AP 010206-Mn/568 tanggal 29 Juni 1985 mengatakan bahwa pabrik pulp dan kertas termasuk pabrik yang memiliki potensi pencemaran air tinggi. Surat Keputusan tersebut juga menguusulkan untuk menghindarkan lokasi PT. IIU ke hilir aliran sungai Asahan yaitu di hilir calon PLTA Taratak bahkan dekat dengan pantai. Surat ini tidak diindahkan oleh pihak IIU.
- SK Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Meneteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang bernomor: SK/681/MBPPT./XI/1986 dan Nomor: KEP/43/MNKLH/II/1986 mengenai limbah cair pabrik pulp dan rayon tersebut.
- Studi kelayakan pada waktu itu disamakan dengan AMDAL berdasarkan ketentuan peralihan PP No.29 tahun 1986, ini merupakan syarat formal dalam pemberian ijin, tak pernah ada pemantauan dan evaluasi oleh instansi yang bertanggungjawab.
- Undang Undang Lingkungan Hidup No.4 tahun 1982 tentang hak dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, hak atas informasi lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Undang Undang ini telah diperbaharui dengan Undang Undang No.23 tahun 1997.
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan Limbah B3, tidak ada pengawasan dan pemantauan tentang penggunaan bahan B3 ini. Padahal penggunaan bahan B3 ini sangat berbahaya jika tidak diawasi secara ketat, karena bisa saja suatu saat pencemaran gas-gas beracun akan terulang kembali.
- Undang Undang No. 5 tahun 1967 tentang kehutanan (tentang tanah ulayat/adat). Setelah diperbaharui dengan

keluarnya UU No.41 tahun 1999 tentang pokok-pokok kehutanan (tentang tanah ulayat/adat), menebang di luar konsesi, melakukan aktifitas illegal (menerima kayu illegal) eksploitasi hutan di kemiringan yang curam (seperti DTA Danau Toba).

(2) Pelanggaran HAM

Pelanggaran Hak Azasi Manusia sejak awal telah dilakukan oleh PT. IIU dan aparat PT. IIU telah merampas hak ulayat tanah Batak, hak anak untuk tumbuh dan berkembang (kesehatan ibu dan anak banyak terpengaruh oleh kehadiran gas-gas beracun dan polusi udara yang dikeluarkan PT. IIU. Selain itu pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh aparat keamanan dan pihak PT. IIU. Hal ini dilakukan kepada rakyat yang menuntut dan melakukan protes terhadap kehadiran PT. IIU yang telah menyengsarakan masyarakat.

Aksi-aksi penolakan warga masyarakat tidak direspon secara baik, malah warga masyarakat ditembak, dan ada yang mendapat penyiksaan, ditangkap dan dekriminalkan (seperti kasus tewasnya Panuju Manurung dan Hermanto Sitorus, sampai saat ini pelanggaran HAM ini tidak pernah diusut bahkan sengaja ditinggalkan). Intimidasi dan penyiksaan oleh preman dan polisi terhadap aktifis masyarakat yang menuntut PT. IIU, penangkapan-penangkapan dan penahanan warga masyarakat secara tidak sah dan tanpa alasan yang jelas/kuat (kasus penangkapan dan penahanan bahkan sekarang sudah divonis terhadap 16 orang warga masyarakat antara lain pimpinan organisasi rakyat/SRB dan beberapa pendeta (suami-isteri). Sweeping dan penyisiran oleh pihak aparat keamanan sering dilakukan sehingga membuat rasa ketidaknyamanan dan memunculkan rasa ketakutan oleh warga. Pembakaran harta benda warga yang turut memprotes kehadiran PT. IIU antara lain rumah, kendaraan/mobil dan lain-lainnya.

Sampai sekarang intimidasi berupa penangkapan dan teror berupa pengerusakkan dan penggerebekan rumah-rumah penduduk serta penembakan-penembakan ke udara bahkan kepada warga masyarakat yang dilakukan oleh pihak Indorayon dengan memakai oleh aparat kepolisian masih terus terjadi. Hal ini mengakibatkan keresahan dan ketakutan bagi warga masyarakat Porsea sehingga keadaan terus mencekam. Bukan hanya warga biasa yang mereka tangkapi akan tetapi beberapa Kepala Desa pun juga jadi sasaran aparat dengan tuduhan berada di belakang dan menghasut warga masyarakat untuk menolak PT. Inti Indorayon.

Walaupun telah banyak penderitaan dan penindasan yang dialami oleh warga masyarakat lokal akibat pemaksaan kehendak oleh pihak industri PT. Indorayon itu, tidak membuat Pemerintah baik yang ada di pusat maupun di pemerintahan daerah berpihak kepada warga masyarakat bawah. Ada indikasi bahwa pihak industri besar dilindungi oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan warga masyarakat sebagai masyarakat biasa selalu tertindas oleh penguasa. Ketidakberdayaan masyarakat lokal sulit mencari keadilan, karena selalu ada di pihak yang salah dan kalah. Maka dari itu dengan tidak adanya ketidakberdayaan, sebagai pihak masyarakat bawah menyatakan sikap kepada seluruh elemen bangsa baik sipil maupun militer sebagai berikut:

- (1) Agar ditutup PT. Inti Indorayon Utama/Toba Pulp Lestari secara final dan segera hengkang atau pindah dari bumi Toba Samosir.
- (2) Agar segera diadakan penarikan aparat keamanan terutama Polisi dan Tentara dari wilayah sekitar industri besar PT. Inti Indorayon khususnya kecamatan Porsea, Toba samosir.
- (3) Segera diadakan pengusutan secara tuntas dan diselesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi akibat kehadiran PT. Inti Indorayon seperti tewasnya warga masyarakat lokal: Ir.Panuju Manurung, Hermanto Sitorus, sebagai akibat protes terhadap kehadiran Industri besar di wilayah Porsea.

- (4) Segera diadakan pembebasan dan merehabilitasi nama baik warga masyarakat Porsea yang dijadikan lokasi industri besar PT. Inti Indorayon, tentang nama baik yang sudah dipenjarakan secara tidak sah dan tidak berdasar atas bukti yang kuat.
- (5) Segera dilakukan pengusutan kepada tim yang mmemberikan rekomendasi kelayakan untuk berdirinya PT. Inti Indorayon Utama di hulu sungai Asahan. Kehadiran industri tersebut telah membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat lokal, terutama adanya sikap ketakutan, tidak tenang dan ada beberapa penduduk yang kehilangan mata pencaharian.

Pada sisi lain dengan kehadiran PT. TPL, mayoritas pemuka agama se-kabupaten Samosir juga mendukung penolakan industri tersebut. Pahit getirnya pengalaman warga masyarakat Porsea dan sekitarnya yang melakukan aksi penolakan operasi PT. TPL membuat masyarakat Tobasa yang tinggal di Pulau Samosir merasa prihatin. Sehingga timbul rasa solidaritas untuk tidak tinggal diam. Bahkan para pemuka agama di Tobasa juga mendukung aksi unjuk rasa damai warga Porsea tersebut.

Hal ini terungkap saat pertemuan para pemuka agama (terdiri dari beberapa sekte di Samosir) dan wakil-wakil warga se wilayah Samosir, pada tanggal 10 April 2003 di Aula St. Mikhael Pangungoran. Beberapa kesepakatan dalam pertemuan ini, dituangkan dalam pokok pikiran. Diantaranya, membuat pernyataan sikap berisi penolakan TPL. Bahkan sebagai langkah awal, pertemuan itu juga merumuskan akan menyurati OTB Sitanggung sebagai pemilik pengangkutan Kapal Ferry penyeberangan di Danau Toba, untuk tidak menerima truk pengangkut bahan baku TPL dari wilayah Samosir. Sebagai konsekuensinya, bila pembabatan pohon terus dilakukan, Pulau Samosir yang dikelilingi Danau Toba akan terancam “tenggelam”.

Selain mendukung sepenuhnya penolakan, diperoleh juga beberapa pokok pikiran. Diantaranya, masyarakat Samosir akan melakukan penghijauan dengan menanami bibit pohon, membuat

surat pernyataan sikap penolakan TPL, yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat, mengedarkan surat para pimpinan gereja dan mengagendakan kebaktian raya terkait dengan persoalan PT. TPL.

Letak geografis Pulau Samosir juga salah satu alasan penolakan bagi perusahaan industri bubur kertas itu. “Panorama Indah Danau Toba potensial jika dijadikan daerah pariwisata, bukan daerah industri”. Itu adalah salah satu poin pokok pikiran.

Hampir seluruh sekte umat menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh para pemuka agama tersebut. seperti pemuka agama, dari Gereja Katholik, HKBP, GKPI, Advent dan agama Protestan lainnya serta umat muslim. Dalam pertemuan itu juga digelar tanya jawab antara masyarakat Samosir dengan warga Porsea yang hadir dan sejumlah aktifis NGO dengan moderator Pastor Albert Pandiangan OFM Cap.

Kemudian dalam acara pertemuan pada sesion Tanya jawab, muncul isu dan pernyataan oknum-oknum tertentu yang mengatakan mayoritas masyarakat yang tinggal di Pulau Samosir mendukung re-operasi PT. TPL. Tetapi hal ini dengan tegas ditentang Pengurus Forum Komunikasi Keluarga Besar Asal Samosir (FKKBS). Dari dahulu warga Samosir apalagi warga kota “Pangurusan sangat alergi terhadap Indorayon. Buktinya kami juga ikut melakukan aksi demo. Bahkan sampai ke DPRD Provinsi, kata Edison Sitanggang, pengurus FKKBS pada pertemuan itu, disambut aplaus dari peserta.

Menurutnya, orang yang selama ini mengatasnamakan rakyat Samosir untuk mendukung TPL hanyalah sebuah rekayasa, untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kalaupun ada yang mengatasnamakan masyarakat Samosir mendukung Indorayon atau TPL itu Cuma segelintir dan hanya rekayasa. Di akhir acara, selanjutnya persoalan TPL akan dibahas kembali pada Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG).

Selain hal tersebut di atas, seluruh pimpinan Gereja se-Sumatera Utara juga menyatakan menolak Reoperasional PT.

Indorayon/PT. TPL di Porsea. Meskipun PT. TPL yang telah disetujui pemerintah untuk direoperasionalkan, ternyata masih belum mendapat tempat di hati warga Porsea, Toba Samosir dan Tapanuli Utara. Sebab sampai sekarang dosa-dosa Indorayon yang telah merusak lingkungan di kawasan Danau Toba belum bisa dilupakan oleh warga masyarakat. Mereka juga belum bisa melupakan kearoganan truk-truk (*logging*) pengangkut kayu pabrik pulp tersebut. Dahulu, truk-truk itu selalu merasa yang punya jalan raya, karena Indorayon dilindungi penguasa Orde Baru (militer) yang represif.

Sejak Indorayon beroperasi, belum pernah pula pabrik pulp itu memberi ganti rugi atas kerusakan lingkungan, dan terhadap warga masyarakat yang menjadi korban. Malah, warga justru merasakan sakitnya dihajar “popor senjata” aparat dan dimasukkan ke penjara, karena mereka mendemo perusahaan tersebut.

Prof. Firman Manurung, pakar teknologi kimia, menerangkan, walaupun Indorayon tak lagi memproduksi serat rayon, tapi limbah kimianya tetap berbahaya. Tentu saja hal ini perlu diperhatikan semua pihak. Sebelum itu, warga masyarakat dan aktivis Walhi sudah mendesak pemerintah agar menutup Indorayon. Akan tetapi, dengan dalih bisa mendatangkan investasi ke Indonesia, jeritan warga masyarakat tak dipedulikan. Makanya, ribuan warga masyarakat berulang kali memprotes pabrik tersebut.

Ironisnya, ketua Tim Sosialisasi Pembukaan Indorayon, Yacob. Nuwa Wea, mengatakan hanya 300 orang yang menolak pembukaan Indorayon. Hal ini jelas sangat tak sesuai dengan fakta, jadi sangat memprihatinkan. Tokoh agama dari HKBP, PGI, KWI, MUI, PP Muhammadiyah, PBNU, juga Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba, Forum Bona Pasogit, dan Tokoh Tobasa, pun sudah berulang kali meminta pemerintah untuk menutup pabrik itu. Permintaan tersebut mestinya bisa membuka mata hati pemerintah dan pemilik Indorayon agar jangan mengorbankan warga masyarakat demi keuntungan ekonomi.

Dengan dibukanya kembali Indorayon, sama halnya pemerintah “menanam bom waktu” di Tobasa. Makanya, bukan tak mungkin partai penguasa (PDIP) yang dulu berjanji akan membela rakyat kecil akan ditinggalkan warga setempat. Kebijakan pemerintah membukanya juga menunjukkan bahwa pemerintah tak bisa diharapkan membela rakyat yang selama ini tertindas.

Pendirian pabrik bubur kertas milik Sukanto Tanoto itu, menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, dari dahulu memang sudah “salah lokasi”. Dan, pendiriannya sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dioperasionalkannya kembali Indorayon juga merupakan indikasi terjadinya konspirasi antara pengusaha dengan penguasa. Juga adanya pendekatan khusus oleh pengusaha kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat yang Pro-Indorayon. Bukan tak mungkin para tokoh itu mendukungnya setelah disogok uang. Karenanya, dalam melihat kasus ini, semua pihak perlu membuka hati. Rakyat Tobasa yang menyuarakan jeritan hatinya harus direspon. Bukan malah akhirnya digebuki dan ditangkapi.

TP Jose Silitonga, SH, pengacara yang selama ini aktif membela warga korban PT. Indorayon mengatakan, jeritan rakyat yang mmeminta PT. Indorayon ditutup mestinya didengar pemerintah. Perlu diingatkan, Bupati Tobasa, Sahala Tampubolon, dan Wagubsu Lundu Panjaitan agar jangan arogan mengancam warga masyarakat yang melakukan demonstrasi. Mereka mengamati bahwa kedua pejabat ini lebih berpihak pada pengusaha dan penguasa ketimbang rakyatnya sendiri. Mereka juga agaknya takut dicopot dari jabatannya, sehingga apa yang diinstruksikan penguasa selalu dituruti. Makanya, mereka perlu berpihak pada rakyat. Sebab, rakyat yang membuat mereka sekarang bisa jadi pejabat (menurut Jose, alumni Universitas Jayabaya, Jakarta).

Pada akhir Maret 2003, Jose diundang Ephorus HKBP Pdt. DR. J.R. Hutauruk dan Uskup Agung Medan Mgr.Pius Batubara OFM guna menghadiri pertemuan para pimpinan Gereja se-Sumatera

Utara di Pematang Siantar untuk menyikapi Pro-kontra soal pembukaan Indorayon. Acara tersebut tadinya diadakan untuk mendengarkan pihak yang pro Indorayon, seperti Leo Batubara dan Jorang Siarait, memaparkan argumentasinya.

Namun mereka tidak hadir, dalam pertemuan para pimpinan Gereja itu Uskup Agung Medan Pius Datubara, Sekjen HKBP Pdt. WTP Simarmata MA, Bishop GKPI GOP Manurung, Ephorus GKPA Pdt. B.Matondang, Bishop GKPPD Pdt. Timur Bancin, Sekjen HKI R.Simanjutak, Bishop GPP Medan GH Manurung, Bishop GMI RPM Tambunan. Menurut Jose, para pemimpin Gereja yang hadir memang menyadari bahwa Indorayon akan bisa menampung tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, para pemimpin gereja yang hadir menegaskan bahwa hal itu tak cukup menjadi faktor pendukung pembukaan Indorayon. Sebab, dengan dibukanya Indorayon, saya berpendapat mungkin akan terjadi *genocide* (pemusnahan etnis Batak), penggundulan hutan-hutan dan pencemaran lingkungan di Tobasa.

Oleh karena itu, para pimpinan Gereja se-Sumatera Utara menyepakati tiga kesimpulan:

- (1) Menolak kehadiran Indorayon.
- (2) Mendesak pemerintah menutup indorayon
- (3) Mendesak pemerintah agar memulihkan kembali suasana damai yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.

Maka dari itu diharapkan warga masyarakat yang masih ditahan di Tarutung, perlu segera dibebaskan dari tahanan. Sebab mereka hanya menuntut kehidupan yang nyaman di Porsea. “Kalau mereka demo lalu ditangkapi dan disiksa, iya sama saja pemerintah seperti rezim Orde Baru. Umumnya warga masyarakat yang ditahan mereka mengaku sering diteror dan disiksa. Hal ini sangat disayangkan karena aparat keamanan masih mengedepankan pendekatan kekerasan pada warga yang menyampaikan aspirasinya.

3.4. Kasus-kasus Akibat Konflik

Keberadaan Industri Besar yakni PT. TPL telah menimbulkan reaksi yang cukup keras oleh masyarakat lokal, hal ini dikarenakan pihak industri kurang bisa merespon yang menjadi kehendak masyarakat lokal. Ada kecenderungan pihak Industri hanya mementingkan dari aspek ekonomi semata yakni keuntungan yang sebesar-besarnya yang diperoleh dari pihak industri, namun mengesampingkan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat lokal dan bahkan sampai tingkat kabupaten bereaksi keras dengan kehadiran industri besar tersebut. Berbagai kasus telah terjadi khususnya yang menimpa pada warga masyarakat lokal sebagai akibat konflik yang terjadi dengan pihak industri besar, mereka mempertahankan yang menjadi haknya karena merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak industri, sementara pihak pemerintah baik pusat maupun daerah terlihat mengesankan membiarkan dan bahkan berpihak pada industri besar. Kondisi inilah yang mengakibatkan warga masyarakat lokal yang merasa dirugikan dan bahkan mengalami penderitaan dan korban-korban banyak yang berjatuhan.

Pada periode pembukaan kembali PT. Indorayon/PT. Toba Pulp Lestari, telah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat konflik antara masyarakat lokal dengan pihak industri besar, dan di pihak masyarakat lokal yang mengalami kerugian dan bahkan penderitaan antara lain:

(1) Peristiwa Penangkapan Dan Penyiksaan Masyarakat yang Melakukan Demonstrasi di Kantor Camat Porsea

Pada tanggal 20 November 2002 masyarakat Porsea melakukan demonstrasi di depan kantor Camat Porsea. Pada saat itu demonstrasi tersebut masyarakat bertemu dengan Camat Porsea (Dra.Rosmida Situmorang). Pada saat itu masyarakat mendesak agar Camat mengeluarkan mandat agar menutup PT. Toba Pulp Lestari yang mulai beroperasi. Camat menyatakan bahwa pembukaan kembali PT. TPL adalah Keputusan Pemerintah Pusat. Dan kepada

masyarakat, camat juga mengatakan bahwa sampai saat itu belum ada keputusan pemerintah untuk mengoperasikan PT. TPL. Camat juga menjamin tidak ada kayu yang masuk ke TPL sebelum adanya keputusan resmi dari pemerintah.

Namun pada malam itu juga masyarakat melihat adanya beberapa truk yang mengangkut kayu untuk bahan produksi pulp yang seperti biasanya dikawal oleh beberapa personil dari kepolisian. Oleh karena itu masyarakat kembali melakukan demonstrasi ke kantor Camat Porsea pada tanggal 21 November 2002 untuk meminta ketegasan Camat akan pernyataannya. Akan tetapi pada saat masyarakat hamper tiba di lokasi (kantor Camat Porsea) mereka melihat ada kelompok lain yang tidak mereka kenal telah berada di sana dan melakukan pengrusakan. Melihat hal itu masyarakat Porsea yang dipimpin oleh Pendeta Miduk segera berusaha menyingkir dari lokasi, namun belum sampai mereka keluar lokasi, mereka sudah dikejar oleh para petugas yang juga sudah melakukan beberapa tembakan peringatan.

Pada saat itu Pendeta Miduk bersama dengan 18 orang warga lainnya ditangkap oleh petugas dan dituduh melakukan penrusakan Instalasi Pemerintahan dan di tahan di Polsek Porsea. Pada saat penangkapan tersebut petugas juga melakukan penganiayaan terhadap masyarakat berupa pemukulan dan tendangan, Pendeta Miduk Sirait saat penangkapan dipukul beberapa kali di bagian dahinya. Di Kantor Polsek Porsea, Pendeta Miduk mengalami penyiksaan berupa pemukulan dan tendangan dari petugas, dan dipaksa untuk menandatangani berkas yang telah disediakan oleh petugas. Kemudian selanjutnya Pendeta Miduk Sirait dipindahkan ke Kantor Polres Tarutung.

(2) Peristiwa Penangkapan Kepala Desa Janjimatogu

Pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2003 Sogar Manurung (kepala desa Janjimatogu) yang pergi dari Porsea menuju ke Balige dengan mengendarai angkutan umum ditangkap oleh petugas dan

dimasukkan ke mobil Kijang warna hijau dengan nomor polisi BB 890. Sogar kemudian ditahan di markas Polsek Tapanuli Utara (Taput) dan informasi penangkapannya baru diberitahukan kepada pihak keluarga korban satu hari setelah penangkapan.

Menurut pihak kepolisian, Sogar ditangkap karena dituduh terlibat tindak pidana pembakaran rumah Pakkat Manurung pada tahun 1998 yang lalu. Sedangkan menurut pengakuan Sogar, latar belakang penangkapannya adalah karena aktivitasnya menentang keberadaan PT. Indorayon dan keikutsertaannya dalam demonstrasi ke Istana Negara dan Komnas HAM untuk mendesak penutupan PT. Indorayon.

(3) Peristiwa Penyiksaan Terhadap Winner Manurung

Pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2003, Winner Manurung (13 tahun) beserta temannya Santun sedang menggembalakan kerbaunya di padang rumput desa Kuala Kabupaten Tobasa. Pada saat itu tak jauh dari tempat menggembalakan kerbaunya, truk pengangkut bahan baku TPL terhenti karena bannya bocor. Kemudian datang 7 orang polisi dan seorang Satpam yang bertugas melakukan pengamanan di tempat itu memeriksanya, dan ditemukan bahwa ada paku yang sengaja diletakkan di tengah jalan dan menancap di ban truk tersebut.

Ditemukannya paku tersebut membuat aparat keamanan kemudian mengejar Winner Manurung yang kebetulan ada di lokasi. Winner Manurung kemudian ditangkap dan dipaksa memberitahukan siapa yang meletakkan paku tersebut. Winner Manurung kemudian dilakukan penyiksaan oleh aparat keamanan tersebut, dengan dipukul di bagian wajah dan tubuhnya, dan ditendang oleh aparat keamanan hingga Winner Manurung mengalami luka parah. Hal ini menggambarkan adanya tindakan aparat keamanan yang dilakukannya tidak berperikemanusiaan tanpa takut mengenal dosa.

(4) Peristiwa Penyiksaan Parlin Butar-Butar di Malposek Tarutung.

Pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2003 pukul 12.00 WIB Parlin Butar-Butar seorang pelajar kelas 2 SMU Negeri Porsea berumur 16 tahun didatangi oleh Polisi, dua orang polisi berpakaian preman yang mengendarai sepeda motor RX King dan seorang polisi lainnya mengendarai mobil kijang. Polisi tersebut kemudian memegang korban dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Mobil tersebut oleh polisi dijalankan menuju Mapolsek Porsea, namun hanya beberapa saat berhenti di Mapolsek, selanjutnya mobil kijang dilarikan menuju Mapolres Tarutung. Di dalam mobil yang saat itu menuju Mapolsek Porsea tersebut, korban dipukul berulang-ulang di bagian perut oleh polisi.

Selanjutnya di Mapolsek Tarutung korban tadi diinterogasi oleh polisi mengenai beberapa peristiwa seperti peristiwa pemasangan ranjau mobil truk pengangkut kayu milik PT. TPL dan aksi-aksi penolakan PT. TPL di Porsea. Dalam interogasi tersebut korban juga dipukul di bagian tubuh dan wajah korban juga dilukai dengan puntung rokok. Setelah selama 24 jam ditahan di Polres Tapanuli Utara korban dilepaskan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2003.

(5) Peristiwa Razia dan Teror Terhadap Crisis Center di Lumban Datu

Pada tanggal 7 Maret 2003 pada pukul 12.00 WIB aparat pemerintahan dan aparat keamanan yakni Camat Porsea, Polsek, Koramil, Jaksa serta lurah mendatangi kantor Crisis Center di desa Lumban Datu, Porsea. Para aparat pemerintah tersebut memasuki kantor Crisis Center tanpa izin dan tidak menjelaskan maksud kedatangan mereka.

Crisis Center di desa Lumban Datu adalah lembaga yang bekerja untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat pasca peristiwa tanggal 21 September 2002 dan memberikan konsultasi

dan bantuan hukum kepada korban penangkapan. Jadi keberadaan kantor ini selalu dicurigai oleh aparat pemerintah, karena khawatir maksud dari pihak industri TPL akan diketahui belang-belangnya. Kantor crisis center selalu berjuang untuk membantu keluhan-keluhan masyarakat yang merasa tertindas dan diperlakukan tidak adil. Namun demikian akan selalu dimonitoring dan dicurigai oleh pihak industri melalui berbagai aparat pemerintahan di wilayah Tobasa.

(6) Razia di PPI, Posko Mahasiswa, Kantor Aktivistis dan Perintah Wajib Laporkan Bagi Aktivistis

Pada tanggal 8 Maret 2003, Muspika Porsea dengan pengawasan aparat keamanan mendatangi dan merazia posko-posko korban. Salah satunya adalah Pusat Pengumpulan dan Pengiriman Informasi (PPI). Kedatangan Camat tersebut untuk mempertanyakan identitas, surat izin, kartu pengenal dan surat tugas dan keperluan mahasiswa berada di Porsea.

Camat dan Muspika juga memerintahkan agar para aktivis atau pekerja kemanusiaan yang berada di wilayah Porsea agar segera meninggalkan daerah tersebut dan memberi batas waktu hingga hari Senin tanggal 10 Maret 2003 kepada para kepala desa untuk melaporkan status mahasiswa dan melaporkannya. Camat juga memerintahkan agar wajib laporkan kepada aparat pemerintahan di Porsea.

(7) Peristiwa di Desa Lumban Kuala

Pada tanggal 15 Maret 2003 telah terjadi peristiwa pelemparan terhadap mobil truk pengangkut kayu milik PT. TPL yang melintasi persimpangan Kampung Sirait Uruk menuju lokasi Pabrik TPL. Beberapa saat kemudian sebuah mobil berisi sebanyak 15 aparat keamanan tanpa seragam dinas yang dilengkapi senjata laras panjang mendatangi desa Lumban Kuala, Porsea.

Aparat keamanan tersebut kemudian langsung menjumpai korban bernama Marcopolo Manurung dan menuduh korban sebagai

pelaku pelemparan serta menyeret dengan paksa tubuh korban menuju mobil. Melihat peristiwa tersebut beberapa ibu-ibu yang kebetulan berada di tak jauh dari peristiwa itu kemudian mendatangi aparat keamanan dan mempertanyakan kenapa Marcopolo Manurung ditangkap. Aparat menyatakan bahwa Marcopolo ditangkap karena melakukan pelemparan truk milik PT. TPL, pernyataan tersebut kemudian disanggah oleh ibu-ibu yang kemudian meminta agar polisi jangan melakukan penangkapan secara paksa.

Kemudian permintaan itu tidak ditanggapi oleh aparat. Marcopolo Manurung kemudian diseret dengan cara paksa menarik kedua kakinya untuk dimasukkan ke dalam mobil. Ibu-ibu tersebut kemudian berusaha mencegah polisi, tetapi segera dihalangi oleh aparat keamanan sehingga terjadi saling tarik menarik dan akhirnya Marcopolo Manurung dapat dibebaskan dan kemudian pergi menyelamatkan diri. Aparat keamanan kemudian melakukan pengejaran dan melakukan penembakan yang mengenai kaki kanan korban dan hingga korban jatuh di tengah jalan. Aparat kemudian menyerukan agar menangkap juga para warga masyarakat yang berada di lokasi peristiwa mendengar hal tersebut masyarakat yang ada kemudian berlari berusaha menyelamatkan diri, dan disusul pula dengan penembakan berkali-kali oleh aparat keamanan.

(8) Peristiwa Penyiksaan Terhadap Siswa SMP

Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2003 pada pukul 12.00 WIB, Hermansyah Manurung siswa kelas dua SMP Parulian Porsea sedang duduk di sebuah warung milik saudaranya. Kemudian datang dua mobil kijang nomor Pol BK 1982 dan nomor Pol BK 465 EA. Dari dalam mobil tersebut turun beberapa orang Aparat Brimob yang kemudian bertanya kepada Hermansyah Manurung mengenai pelaku pelemparan truk.

Kemudian Hermansyah Manurung mengatakan bahwa dirinya tidak tahu pelaku dan masuk ke dalam rumah. Aparat kemudian melakukan pengejaran dan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar

tersebut aparat melakukan penyiksaan terhadap Hermansyah Manurung. Aparat menendang tubuh Hermansyah Manurung dengan sepatu laras, salah satu aparat juga menendang kepala Hermansyah Manurung. Setelah itu aparat kemudian meninggalkan korban dan terus pergi. Suatu hal yang ironis memang, tetapi kenyataan benar-benar suatu kejadian yang tidak lazim dilakukan oleh kebanyakan orang.

(9) Teror Terhadap Jonggara Manurung

Pada suatu saat, waktu itu telah terjadi bahwa di dalam kamar Jonggara Manurung seorang aktivis ditemukan sebutir peluru³. Jonggara Manurung mengetahui ada peluru di kamarnya ketika ia baru pulang dari pertemuan setelah menerima laporan bahwa aparat sering melakukan penggeledahan ke rumah-rumah penduduk di wilayah Porsea. Dan pada saat itu keadaan rumahnya tidak dihuni.

Jonggara Manurung sebagai seorang aktivis dalam kehidupan kesehariannya memang selalu dicurigai oleh aparat. Dan tentu saja menjadi incaran untuk ditangkap, dengan alasan harus dicari kesalahannya terlebih dahulu atau alasan kambing hitam asal bisa melakukan penangkapan. Kondisi saat itu di wilayah Porsea seolah-olah dalam suasana mencekam, warga masyarakat merasa hidup tidak tenang, nasib tidak menentu, selalu berada di pihak yang salah pada hal tinggal di wilayahnya sendiri.

(10) Peristiwa di Desa Lumban Huala

Pada tanggal 23 Februari 2003 pukul 14.30 WIB di desa Lumban Huala, dua buah mobil yaitu mobil kijang warna merah dengan nomor polisi BB 246 dan kijang warna biru tua Nomor polisi BB 890 serta satu unit truk milik PT. TPL melintas di desa Lumban Huala, kecamatan Porsea menuju pabrik bubur kertas PT. TPL. Setelah tidak berapa lama melintas di desa Lumban Huala, ketiga

³ Peluru ini yang biasa dipakai oleh senjata organik polisi.

mobil tersebut berhenti. Kemudian dari dalam mobil kijang turun 4 orang anggota Brimob, 3 diantaranya memakai celana dinas dan kaos Brimob dan sedangkan seorang lagi hanya memakai celana pendek serta kaos dan membawa senjata laras panjang.

Pada saat itu ada dua warga masyarakat desa yakni Op Betty Manurung dan temannya melintas di jalan yang sama. Ketika melihat dua orang tersebut, Brimob secara kasar menuduh dua warga desa tersebut sebagai pelaku pelemparan kaca mobil. Karena takut dan bingung dua orang tersebut kemudian meninggalkan Brimob tersebut menuju arah jalan raya Porsea dan mendengarkan suatu tembakan yang dilepaskan oleh Brimob untuk mengancam mereka.

Kemudian anggota Brimob dan Supir truk PT. TPL tersebut menuju rumah penduduk dan berhenti di depan warung kopi milik S.Manurung. Kemudian 4 orang anggota Brimob tersebut turun dari mobil kijang, tiga diantaranya kemudian masuk ke warga kopi dan secara kasar berteriak menanyakan kepada warga tentang siapa pelaku yang telah melemparkan kaca mobil. Sedangkan seorang anggota Brimob mengelilingi rumah dan melepaskan tembakan ke arah atas untuk mengancam warga.

Setelah melepaskan tembakan, seorang anggota Brimob kemudian merusak warung kopi, melemparkan meja, kursi dan menghamburkan isi warung, kemudian masuk ke dalam kamar dan merusak isi kamar. Dua orang anggota Brimob kemudian meninggalkan rumah S.Manurung dan berkeliling menuju rumah penduduk lain. Warga yang melihat kejadian hal tersebut, meminta agar para anggota Brimob jangan melakukan penembakan, karena banyak anak-anak. Permohonan warga tidak dihiraukan oleh anggota Brimob dengan melepaskan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali ke arah atas. Penembakan tersebut membuat para ibu-ibu menjadi ketakutan dan warga masyarakat lokal dibikin menjadi tenang. Sambil meninggalkan lokasi, salah seorang anggota Brimob kemudian mengancam dengan mengeluarkan kata-kata “kampung ini akan kami bakar”.

(11) Teror, Ancaman terhadap Pastoran Balige dan Penangkapan Aktivis di Simpang Uruk Porsea

Pada tanggal 12 Februari 2003, pukul 03.00 WIB sebuah mobil merk Taft No. pol. BB 475 EA yang sedang di parkir di halaman rumah Pastor Balige dirusak dan dibakar. Akibat peristiwa tersebut, kaca mobil sebelah kiri dan kanan pecah, sedangkan jok dan isi mobil dari belakang sampai depan hangus terbakar. Tidak diketahui siapa pelaku pembakaran tersebut, namun komunitas pastoran Balige menduga bahwa teror tersebut terkait dengan perjuangan para pastor untuk membela rakyat Porsea dalam aksi penolakan PT. TPL.

Kemudian pada hari Sabtu, 30 Desember 2002 pukul 08.30 WIB lima orang aktivis lingkungan ditangkap karena menentang rencana operasi PT. TPL. Kelima aktivis tersebut adalah: Dwi Wandari dari WALHI Sumatera Utara, Soarlin Siagian dari LBH dan advokasi masyarakat Sumatera Utara. Dan ketiga lainnya adalah mahasiswa Universitas Katolik St Thomas yaitu: Andi Panggabean, Robinson Sihombing dan Mester Sinambela. Kelimanya ditangkap pada saat akan memasang spanduk di Simpang Sirait Uruk Porsea. Dalam penangkapan aparat Polsek Porsea juga mengambil sepeda motor dan sejumlah spanduk. Kelima aktivis ini kemudian diperiksa di Mapolsek Porsea yang berjarak sekitar 20 Km dari Balige, yang kemudian dilepas pada siang harinya.

PARADIGMA BARU DAN REOPERASIONAL PT. TPL

4.1. Reoperasional PT. TPL dan Hambatannya

Walaupun PT. Toba Pulp Lestari (TPL) telah diizinkan pemerintah pusat beroperasi kembali lewat paradigma barunya (tanpa pabrik rayon) namun sampai sekarang masih terdapat sikap pro dan kontra masyarakat terhadap rencana re-operasional PT. TPL. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih adanya sekelompok masyarakat yang menyatakan dirinya Suara Rakyat Bersama (SRB) tetap ngotot mengatakan tidak ada kata lain, selain tutup Indorayon dan tolak TPL.

Menuurut pengakuan para korban sebagai akibat tindakan represif dari pihak keamanan kepada tim Komnas HAM di Porsea, masyarakat yang tergabung dalam SRB dulunya paling ditakuti di Toba Samosir. Tidak usah bilang buka Indorayon atau TPL, hanya akan dicurigai saja pro terhadap Indorayon atau TPL, rumahnya habis dibakar, dan orangnya dipukuli bahkan ada yang dibunuh secara sadis (menurut pandangan Saidi Sitorus). Tetapi setelah tokoh-tokoh masyarakat yang vokal seperti Musa Gurning, Krisman Sitorus, Pdt Miduk Sirait ditangkap polisi berkaitan dengan pengrusakan kantor Camat Porsea pada tanggal 21 November 2002, tindakan anarkhis, secara berangsur-angsur berkurang walaupun masih ada seperti pemblokiran jalan dan pengrusakan jalan menuju lokasi kantor PT. TPL. Jika kelompok SRB diajak berdialog sama sekali tidak mau, mereka selalu berkata, tidak ada kata lain selain tutup Indorayon dan “Tolak TPL”.

Tuntutan SRB supaya PT. IIU/TPL ditutup tanpa syarat sebenarnya tidak dipermasalahkan warga masyarakat Toba Samosir, yang menjadi permasalahan terjadinya pembakaran rumah penduduk, kutipan Rp.10.000; per KK untuk jaga malam, intimidasi, penganiayaan dan pembunuhan orang yang dituduh pro Indorayon. Maka untuk menghindari terjadinya balas dendam yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat Toba Samosir, pemerintah pusat melalui “tim sebelas” di bawah pimpinan Jacob Nuwa Wea secara marathon melakukan pendekatan terhadap kedua kelompok masyarakat baik yang pro dan yang kontra.

Pendekatan melalui sosialisasi yang dilakukan Tim Sebelas bekerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat boleh dikatakan berhasil walaupun masih perlu dilaksanakan sosialisasi di sejumlah tempat tertentu. Agar warga masyarakat tidak tahu-menahu soal kimia lepas dari hasutan orang yang selalu mengatakan bila pabrik PT. TPL dioperasikan, anak manusia di Toba Samosir akan lahir kerdil, termasuk ternak-ternak akan mati, padi puso. Situasi dan suasana ketakutanpun bermunculan bagi warga masyarakat Porsea, karena disitu telah terjadi polarisasi sosial. Boleh dikatakan terdapat dua kelompok masyarakat, yakni kelompok PRO TPL, yang mana biasanya ini terdiri dari warga masyarakat yang setuju dibukanya TPL seperti yang mayoritas bekerja di TPL. Sedangkan kelompok yang Kontra adalah mereka yang sama sekali menolak TPL, seperti mereka yang merasa dirugikan dengan kehadiran TPL, pernah keluarganya yang terkena korban penggusuran dan penganiayaan oleh aparat keamanan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh tim sebelas pun lama-kelamaan juga menemui hambatan-hambatan. Kondisi ini karena dipengaruhi oleh sikap masyarakat lokal yang kritis dan vokal, dan seolah-olah memiliki rasa sense of belonging yang tinggi terhadap tanah Toba Samosir, mereka tidak mau dilakukan semena-mena, serta merasa mempunyai harga diri yang tinggi dan tidak boleh diremehkan.

Dalam kaitannya dengan penuntutan keadilan bagi warga masyarakat lokal, mereka harus diberikan informasi yang terbuka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Menurut sosiolog (Dra. Ria Manurung) mengatakan setelah penegakan hukum mulai terlaksana di Tobasa, para keluarga korban pembakaran, penganiayaan, intimidasi dan pembunuhan, termasuk saksi-saksi kejadian, sudah mulai berani mengemukakan apa yang dilihat, di dengar dan yang dialaminya. Selama ini walaupun mereka telah menderita akibat perbuatan sekelompok masyarakat yang menyatakan dirinya anti terhadap Indorayon, sama sekali tidak mau mengemukakan yang dilihat maupun yang dialaminya (mereka selalu aksi tutup mulut) artinya tidak mau memberikan keterangan kepada pihak kepolisian agar kasus tersebut dapat terungkap.

Karena itu menurut pakar tadi, bahwa menyarankan kepada pihak pemerintah Kabupaten Tobasa beserta unsur aparat penegak hukum di Toba Samosir supaya mengantisipasi perkembangan situasi, sebab penderitaan yang dialami para keluarga korban keganasan sekelompok masyarakat selama ini bisa secara tiba-tiba meluap.

Sementara itu, Syamsudin selaku ketua Tim Komnas HAM ketika dimintai komentarnya menjelaskan, pihaknya menganjurkan kepada pihak masyarakat yang kontra (SRB) supaya tidak bertindak anarkhis, silahkan berjuang, dan perjuangan itu silahkan ditempuh melalui proses hukum ke pengadilan. Syamsudin juga menambahkan mereka juga menerima laporan dari pihak keluarga korban kekerasan SRB.

Di akhir pertemuan antara Komnas HAM dengan Bupati Toba Samosir yang didampingi Assisten I Pemerintahan Drs.Tonggo Napitupulu, Kadis Penertiban Sedih E.Simanjutak, dan Kabag. Humas Drs.Manarhap Simanjutak. Syamsudin mengakui bahwa pihaknya menerima telepon, isinya supaya Tim Komnas HAM jangan mau diajak makan oleh pihak PT. TPL dan Pemerintah Kabupaten Tobasa, karena itu katanya pihak pemerintah Kabupaten Tobasa tak

usah kecewa walaupun kami ini tidak makan bersama dengan bapak-bapak semuanya, katanya mengakhiri pertemuan tersebut.

4.2. Paradigma Baru PT. TPL

Operasi PT. Indorayon di Porsea telah ditutup secara efektif sejak akhir tahun 1998 sebagai akibat gelombang demonstrasi dan blokade penduduk lokal. Kemudian dalam Pemerintahan presiden Habibie melakukan instruksi agar dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial budaya dari satu-satunya pabrik gabungan pulp dan serat rayon sebagai respon atas keluhan dari masyarakat lokal tentang udara, air, dan polusi suara, pelanggaran hak atas tanah dan kurangnya lapangan kerja serta ketidakadilan kompensasi.

Pada bulan Mei 2000, pemerintah memutuskan bahwa PT. Indorayon Pulp dapat beroperasi namun tidak memproduksi serat rayon. Hal ini membangkitkan kembali protes oleh masyarakat lokal lebih lanjut. Untuk memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat dalam bentuk janji-janji seperti lapangan kerja, kesempatan usaha dan lembaga masyarakat yang disponsori oleh perusahaan dan investor asing, ditolak. Pabrik di Porsea tidak dapat beroperasi kembali dan Indorayon menderita kerugian finansial yang sangat besar. Pada bulan September 2000 penunjang dana luar negeri perusahaan sudah kehilangan kesabaran dan 1000 dari 7000 karyawan diberhentikan. PT. Indorayon kemudian merubah namanya menjadi PT. Toba Pulp Lestari dan merubah struktur kepengimpinannya. Namun, itupun ternyata tidak mampu meredam perlawanan baik yang dilakukan oleh LSM yang bergerak di bidang lingkungan masyarakat di sekitar PT. TPL.

Kemudian, pada bulan Maret 2001, Gubernur Sumatera Utara T Rizal Nurdin meminta penundaan pengoperasian PT. IIU setelah selesainya prosedur proses administrasi di dalam manajemen PT. Indorayon, yaitu pergeseran kepemilikan saham, susunan direksi dan perubahan nama dari PT. IIU menjadi PT. Toba Pulp Lestari (PT.

TPL). Sementara itu, keseluruhan proses pemberian izin pengoperasian PT. Indorayon terletak di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Namun bagi kalangan LSM dan organisasi rakyat yang menentang operasi kembali PT. IIU, Indorayon tidak jujur karena yang disosialisasikan PT. TPL, tetapi di lapangan, semua surat-surat dari manajemen masih berstempel PT. Indorayon. Pihak perusahaan meminta agar semua pihak mempelajari paradigma baru PT. TPL, terutama yang berkaitan dengan sosial ekonomi dan budaya.

Salah satu butir dari paradigma baru tersebut adalah janji untuk menyisihkan dana sebesar satu persen dari hasil penjualan bersih setiap tahun untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat jika perusahaan tersebut beroperasi kembali. Perusahaan ini akan membuka kesempatan kepada institusi ekonomi masyarakat untuk ambil bagian dalam kegiatan usaha berbentuk kemitraan. Namun jika dilihat dari perspektif investasi, operasi kembali PT. IIU lebih didorong oleh alasan keberadaan modal perusahaan asing Namura International sebesar 40 juta dollar AS. Bagi PT. IIU, tuntutan masyarakat agar PT. IIU merelokasi perusahaan dipandang sama dengan membuat yang baru. Dalam konteks inilah perusahaan kemudian mensosialisasikan paradigma baru melalui forum-forum temu pakar dan masyarakat untuk memberikan gambaran positif tentang kinerja PT. IIU di masa mendatang.

Pada pertemuan pakar di Parapat, pada akhir September 2000, Indorayon direkomendasi agar segera mengubah sistem manajemennya yang dinilai gagal, sebelum beroperasi kembali. Dalam forum tersebut, tercatat lima kesalahan PT. Indorayon yang membuat perusahaan ini ditolak masyarakat sekitar:

- (1) Penempatan lokasi pabrik. Letaknya yang di hulu sungai dan di tengah permukiman jelas tidak akrab lingkungan.
- (2) Kesalahan teknologi yang dipakai sehingga membuat limbah tidak terkontrol pembuangannya. Limbah ini sering mencemari lingkungan, seperti terjadinya kebocoran gas klorin.

- (3) Kesalahan kepemimpinan PT. IIU yang dinilai arogan terhadap rakyat.
- (4) Kesalahan manajemen, yaitu terlalu sedikit mengikutsertakan penduduk lokal dalam perusahaan,
- (5) Kesalahan merusak budaya lokal. Semenjak PT. IIU beroperasi, banyak pola baru masuk ke penduduk sekitarnya, seperti misalnya: minuman keras, dan tempat-tempat lokalisasi liar.

Bersamaan dengan dijalankannya forum sosialisasi, para investor PT. Indorayon pun melakukan serangkaian langkah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Langkah awal dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 Nopember 2000, dimana PT. Indorayon mengubah namanya menjadi PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL). Perubahan nama itu berkaitan dengan keputusan pemerintah dalam sidang kabinet yang dipimpin Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 10 Mei 2000, yaitu menutup pabrik rayon dan membuka pabrik Pulp. RUPS menilai nama Indorayon tidak relevan lagi digunakan karena pabrik rayonnya telah ditutup. Atas dasar berbagai rekomendasi itu pula, manajemen mengganti jajaran direksi. Sedangkan untuk mewujudkan prasyarat re-operasi tersebut manajemen merumuskan konsep tentang visi dan misi Indorayon yaitu “Paradigma Baru PT. TPL”.

Paradigma baru itu berisi antara lain tentang perubahan gaya manajemen yang akrab dengan lingkungan. Disebutkan bahwa:

- (1) PT. TPL akan bekerjasama dengan masyarakat dengan melakukan tumpangsari yang saling menguntungkan.
- (2) PT. TPL juga menerima dan mendukung lembaga independen yang ahli di bidangnya untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) PT. TPL akan menyisihkan keuntungan dari hasil penjualan bersih pulp mereka sebesar satu persen. Pengelolaan dana satu persen ini akan dilakukan oleh sebuah badan pengelola keuangan.

Rencana pemberian satu persen dari hasil bersih produksi pulp tersebut lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara/Toba Samosir (sebelum berpisah) pada tahun 1997/1998 sebesar Rp.5,1 milyar.

Dalam upaya sosialisasi ini paradigma baru PT. TPL, bahkan Gubernur Sumut T. Rizal mengeluarkan surat imbauan sosialisasi reoperasi Indorayon pada tanggal 2 November 2000 dan meminta Bupati Toba Samosir melakukan persiapan reoperasi. Selama bulan Maret 2000 PT. IJU melakukan enam kali pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Toba Samosir atas fasilitas pemerintah kabupaten, yaitu di Balige, Laguboti, Porsea, dan Pangururan. Perusahaan mengklaim bahwa sosialisasi yang dilakukan PT. Indorayon sudah mendapat dukungan sebagian besar masyarakat. Bagi pemerintah Kabupaten Tobasa, uluran tangan PT. TPL akan bagi hasil satu persen itu merupakan tawaran menggiurkan di tengah krisis ekonomi yang parah saat itu.

Untuk mendukung upaya sosialisasi, pertemuan ilmiah antar pakar, baik yang kontra maupun pro Indorayon, digelar di Prapat pada akhir September 2000. Namun Indorayon sepertinya hanya mampu mensosialisasikan visi dan misi paradigma barunya kepada kalangan aparat pemerintahan dan masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pabrik, misalnya kecamatan Balige. Dua kali pertemuan di Balige tanggal 8 dan 15 Maret 2002 merupakan pertemuan tingkat kabupaten yang diikuti seluruh kepala desa, camat dan tokoh masyarakat. Namun langkah membuka kembali operasi Indorayon pada tanggal 31 maret 2002 gagal dilaksanakan. Ribuan warga di Toba Samosir melakukan aksi damai bersama menolak dioperasikannya kembali Indorayon. Puncak penolakan masyarakat tampak pada tanggal 31 maret 2002, dimana ribuan warga di sekitar Porsea berkumpul di Simpang Sirait Uruk atau sekitar tujuh kilometer dari pabrik Indorayon di Sosorladang, melakukan aksi bersama menolak beroperasinya kembali pabrik Pulp itu.

Sosialisasi PT. IIU itu tidak mampu melunakkan penolakan warga terhadap Indorayon. Menurut pengakuan warga di sekitar Porsea, sejak Indorayon ditutup mereka kembali dapat menghirup udara segar selama 24 jam. Selain itu, hasil panen padi maupun ikan mas yang ditanam di sawah pun mulai membaik. Salah seorang warga desa Silamo Situa, kecamatan Porsea, mengatakan bahwa tanaman padi warga di desanya yang disemai di sawah cukup subur. Hasilnya jauh lebih baik dibandingkan Ketika Indorayon beroperasi.

PT. TPL merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang proporsional untuk bisa mensosialisasikan arah PT. TPL di masa mendatang. Pihak manajemen meyakini bahwa paradigma baru TPL bukanlah sekadar ganti baju belaka bahkan pasti diterima masyarakat karena benar-benar membuka peluang kepada masyarakat ikut berperan langsung dalam proses produksi sekaligus menikmati hasilnya. Gubernur Sumatera Utara T Rizal Nurdin sendiri mengusulkan dibentuknya tim independen yang terdiri dari para ahli untuk meneliti layak tidaknya PT. TPL beroperasi kembali.

Bagi masyarakat, penutupan secara total seluruh kegiatan pabrik kertas dan pulp PT. IIU yang kini berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari tidak dapat ditawar-tawar dan dikompromikan lagi. Masyarakat Porsea tetap menolak beroperasinya kembali pabrik yang selama ini menimbulkan berbagai masalah bagi mereka, baik lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi maupun sosial budaya. Masyarakat lokal khususnya dari Porsea bahkan memutuskan datang ke Jakarta jika tidak ada kemajuan dalam penyelesaian kasus tersebut. Hal ini dilakukan oleh para tokoh masyarakat Porsea yang menemui Presiden Abdurrahman Wahid untuk meminta ketegasan pemerintah tentang status pabrik itu. Mereka juga pergi ke DPRD Sumatera Utara dan DPR pusat. Melalui dengar pendapat dengan DPRD Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2001 DPRD mengeluarkan rekomendasi bahwa PT. Indorayon tidak layak dari segi lingkungan, sosial dan kesehatan serta menuntut dilakukannya audit total, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.

Bagi pemerintah seperti pendapat Menteri Perdagangan dan Industri RI dalam Kabinet Gusdur, Luhut Panjaitan, mengatakan bahwa untuk membuka atau menutup PT. IJU sangat berkaitan dengan kondisi krisis yang sedang dialami. Disini terlihat juga kecenderungan pemerintah untuk lebih mendahulukan kepentingan investasi daripada ketidakpuasan segelintir orang khususnya kepentingan masyarakat lokal. Situasi pro dan kontra dari kedua kubu ini menjadikan upaya untuk menyelesaikan konflik antar warga dengan Indorayon menjadi semakin sulit. Pemerintah bukan hanya berhadapan dengan rakyat, tetapi akhirnya juga dengan dunia internasional, terutama soal jaminan berinvestasi.

Masalah PT. IJU tidak berhenti dengan keluarnya keputusan presiden. Setelah PT. IJU berganti nama menjadi PT. TPL, Pro dan Kontra di kalangan masyarakat belum berhenti. Baik pihak perusahaan, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dan LSM masih mempertahankan posisi dan pendapatnya masing-masing dengan mengemukakan pertimbangannya. Tampaknya persoalan takut kehilangan investasi, apalagi dalam situasi krisis ekonomi, menjadi pertimbangan lain yang mendorong pemerintah agar bertindak sebagai fasilitator dalam konflik tersebut.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kabinet Megawati, Jacob Nuwa Wea, pernah menjanjikan penyelesaian dalam masalah PT. TPL, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar TPL. Dalam pendapatnya, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya, dan kini tinggal mencari akar permasalahannya agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Jika masalahnya ada di sector lingkungan dan masyarakat sekitarnya maka pihak perusahaan harus duduk bersama dengan masyarakat setempat untuk penyelesaian.

Namun pendapat Menteri itupun susah direalisasikan, karena ketika itu beliau seharusnya berkunjung ke TPL, tetapi bukannya di TPL melainkan ke Balige, sehingga hanya pejabat-pejabat pemerintah daerah dan pejabat TPL yang meresponnya. Sementara tokoh-tokoh

masyarakat yang pro dan kontra TPL dan masyarakat lokal umumnya yang menyambut di Balige kurang proporsioanal jumlahnya.

Akhirnya, melihat kenyataan, penyelesaian dengan melakukan dialog yang mengandaikan kesetaraan diantara pihak-pihak yang berkonflik masih jauh dari harapan. Bahkan sampai perkembangan terakhir, ketika penelitian ini masih berlangsung konflik antara masyarakat lokal dengan TPL masih memanas tanpa penyelesaian yang jelas. Demonstrasi-demonstrasi tidak pernah berhenti dari berbagai kalangan, baik pria maupun perempuan, LSM, mahasiswa, tuntutananya hanya satu "Tolak Indorayon, Tutup TPL". Permohonan tutup TPL ini pernah disampaikan kepada DPRD Tobasa, dan oleh DPRD diterima dengan baik dan mengabulkan, kemudian oleh DPRD permohonan itu disampaikan ke Jakarta, tetapi hasilnya tidak ada tanggapan dari pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Hubungan antara PT. TPL dengan masyarakat sekitar di Porsea, merupakan suatu contoh nyata ketidakharmonisan antara kedua belah pihak, hal ini dikarenakan ada keterkaitan dengan sejarah berdirinya industri tersebut. Ketika mendirikan industri, seharusnya pihak Indorayon, mempertimbangkan benar-benar kondisi daerah apakah cocok untuk lokasi industri, atau lebih cocok untuk permukiman, dan sebagainya. Secara realitas, industri itu didirikan secara paksa hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tanpa mempertimbangkan faktor geografis, dan yang lebih parah lagi tanpa mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat lokal.

Gambaran hubungan sosial yang kurang harmonis itu menunjukkan bahwa peranan pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal kesulitan untuk menyelesaikannya dan boleh dikatakan masalahnya telah akut di wilayah ini. Salah satu kesulitan untuk menyelesaikan adalah masih adanya Pro dan Kontra masyarakat lokal atas kehadiran industri di sana, apakah diterima atau ditolak. Mereka memahami konsekuensi apa yang akan menimpa mereka bila ditolak ataupun diterima. Namun demikian, hubungan yang kurang harmonis dan mengarah ke konflik, ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah lokal, investor, sehingga sulit untuk menyelesaikannya dan ada kecenderungan masalah ini akan berkepanjangan. Sementara masalah ini belum ada kejelasan dan kepastian baik dari segi politik maupun segi hukum.

Dari aspek sosial, dengan keberadaan industri itu telah menimbulkan berbagai perubahan kehidupan masyarakat lokal. Salah satu yang dominan adalah mudurnya lembaga adat Dahlian Natolu.

Kurang berfungsinya lembaga ini, dikarenakan tokoh-tokohnya terpecah menjadi dua, pada satu sisi mengikuti kelompok Pro dan sisi lain ada yang mengikuti kelompok Kontra. Perpecahan inilah, berdampak terhadap pola kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang menjadi pertanyaan adalah kepada siapa warga masyarakat harus mengikuti panutan terhadap orang yang dianggap tokoh masyarakat seperti ketika wilayah ini belum terdapat industri.

Akibat kurang keharmonisan hubungan antara kedua belah pihak antara masyarakat sekitar industri dengan pihak industri yang berlarut-larut telah melahirkan konflik. Konflik bisa dilihat dari indikasi-indikasi masyarakat sekitar yang terkena pengusuran tanah untuk lokasi industri, merasa tidak puas yang cenderung membentuk kelompok untuk menyerang PT. TPL. Kelompok yang terbentuk ini terbagi menjadi dua, pada satu sisi berdiri kelompok Pro Industri TPL dan sisi lainnya berdiri kelompok Kontra TPL. Yang dianggap musuh oleh PT. TPL adalah kelompok masyarakat yang kontra TPL yang umumnya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang tangguh pendiriannya untuk menolak TPL karena kebijakan yang dilakukan bersifat "arogan". Ketidakberdayaan masyarakat yang dirugikan oleh keberadaan PT. TPL, menyebabkan masyarakat bersifat apatis dan pembelaan dari pemerintah setempat dianggap kurang. Pemerintah daerah setempat cenderung membela keberadaan TPL, yang menurut persepsi dari pihak yang kontra TPL, pejabat-pejabat pemerintah daerah setempat mendapat fasilitas dari PT. TPL. Kondisi inilah yang menciptakan para pejabat pemerintah daerah yang berkompetensi dengan pihak industri selalu berada dan mendukung keberadaan industri PT. TPL.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, 2001; *Limbah Pers Di Danau Toba*, Yogyakarta: LP3Y Yayasan Kipas, Nopember 2001.
- BPS Kabupaten Tapanuli Utara, 2006; *Karakteristik Penduduk Kabupaten Toba Samosir*, Balige: kerjasama Bappeda Tobasa & BPS Tapanuli Utara.
- Daldjoeni, 1992; *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Bandung: Penerbit Alumni, Edisi Revisi.
- G.Tan, Melly, dkk, 1986; *Aspek Sosial Pengembangan Pulau Batam*, Jakarta: Otorita Batam.
- Irawan Maryono, dkk, 1985; *Pencerminan Nilai Budaya Dalam Arsitektur Indonesia*, Jakarta: Djambatan, cetakan Ke dua.
- Koentowidjoyo, 1983; *Industrialisasi dan Dampak Sosialnya*, Jakarta: Prisma, No.11/12
- Koentjaraningrat, 1983; *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia
- , 1982; *Masalah-masalah Pembangunan: Lima Masalah Integrasi Nasional*, Jakarta: LP3ES
- Lerner, Daniel, 1985; *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasikoen, 1989; *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Pelly, Usman, 1994, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Mandailing dan Minangkabau*, Jakarta.
- Parker, S. Brown, 1990, *Sosiologi Industri*, Jakarta: Penerbit Rineke Cipta.

- Soekanto, Soerjono, 1984; *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastrodihardjo, Soedjito, 1987; *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Suseno, Franz Magnis, 1985; *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafah Tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT Gramedia.
- Tim Peneliti PMB-LIPI, 1994; *Transformasi Nilai-Nilai Sosial Budaya Menuju Masyarakat Industri*, Jakarta:PMB-LIPI.
- Tim Pendukung Perjuangan Rakyat Tobasa, 2003; *Perjuangan Rakyat Tobasa untuk Tutup Indorayon /Tolak TPL*, Jakarta: Juni 2003.
- Usman, Sunyoto, 1998; *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

